

LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
TUBAN TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TUBAN
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah merupakan dokumen awal yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) dan mengacu kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perubahan Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disusun dengan mengacu pada rancangan awal P-RKPD, Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan. Perubahan Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pembangunan dibidang administrasi kependudukan bertujuan memberikan pelayanan administrsi kependudukan kepada masyarakat dalam hal ini pelayanan terhadap dokumen kependudukan. Saat ini hampir semua keperluan masyarakat membutuhkan dokumen kependudukan (KTP el, Kartu Keluarga, KIA, dan Akta Pencatatan Sipil). Selain itu, pembangunan dibidang administrasi kependudukan juga untuk membangun database kependudukan yang mana dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016ltentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 49 Tahun 2022 tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, sebagai lembaga yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Adapun tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tipe A.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- e. Penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, serta perencanaan;
- f. Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
- g. Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah dan negara yang menjadi tanggung jawab dinas;
- h. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam mencapai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam tupoksi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibantu oleh 4 (empat) bidang, 1 (satu) sekretariat, yaitu:

- 1. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
- 2. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
- 3. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- 4. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.
- 5. Sekretariat.

Masing-masing bidang membawahi 2 (dua) kelompok jabatan fungsional, sedangkan Sekretariat membawahi 2 (dua) sub bagian dan 1 (satu) kelompok jabatan fungsional.

2. Landasan Hukum.

Dalam penyusunan perubahan rencana kerja perangkat daerah ini, landasan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 185);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 182);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 7 Seri D);

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri E Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019);
- 31. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 147, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 161);
- 32. Peraturan Bupati Tuban Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 Seri E Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 96 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tuban 2022 Seri E Nomor 67);
- 33. Peraturan Bupati Tuban 49 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban 2022 Seri D Nomor 21);
- 34. Peraturan Bupati Tuban Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri A Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri A Nomor 1);
- 35. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri E Nomor 10).

1.3. Maksud dan Tujuan.

Maksud Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Tahun 2025 adalah:

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

- a. Sebagai Pedoman Pelaksanaan.
Perubahan Rencana Kerja (Renja) menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- b. Penetapan Prioritas.
Perubahan Rencana Kerja (Renja) membantu menentukan skala prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.
- c. Pengalokasian Anggaran.
Perubahan Rencana Kerja (Renja) menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), memastikan anggaran dialokasikan sesuai dengan prioritas
- d. Sinergi dan Keterkaitan.
Perubahan Rencana Kerja (Renja) menjamin sinergi dan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
- e. Akuntabilitas.
Perubahan Rencana Kerja (Renja) yang jelas dan terstruktur mendorong akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- f. Evaluasi Kinerja.
Perubahan Rencana Kerja (Renja) menjadi dasar untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Tahun 2025 adalah:

- a. Menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) ke dalam Rencana Operasional.
Perubahan Renja menguraikan langkah-langkah konkret yang perlu diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan dalam Renstra.
- b. Menjadi Pedoman Pelaksanaan Kegiatan.
Perubahan Renja memberikan panduan bagi aparatur dalam melaksanakan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran, memastikan bahwa semua kegiatan selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

- c. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas.
Dengan adanya Perubahan Renja, pelaksanaan program dan kegiatan dapat terencana dengan baik, sehingga dapat meminimalkan pemborosan sumber daya dan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran.
- d. Memastikan Akuntabilitas.
Perubahan Renja membantu memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan karena adanya rencana yang jelas dan terukur.
- e. Memudahkan Monitoring dan Evaluasi.
Perubahan Renja memuat target-target kinerja yang terukur, sehingga memudahkan proses monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan pembangunan.
- f. Menjadi Dasar Penyusunan Anggaran.
Perubahan Renja menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan, yang berisi rincian biaya untuk setiap program dan kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan.

Adapun sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN.

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal P-RKPD.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.
BAB IV PENUTUP.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Tahun 2025, perlu kiranya berpedoman pada penyelenggaraan bidang kependudukan dan catatan sipil pada Triwulan II Tahun 2025 yang secara umum dapat digambarkan dalam beberapa program dan kegiatan antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Program ini meliputi 7 kegiatan yaitu:
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, untuk penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah diantaranya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD, Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (SAKIP, Reformasi Birokrasi, Zona Integritas), dengan anggaran sebesar Rp. 162.500.000 dan terealisasi Rp. 8.980.500,-.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN meliputi Gaji dan Tunjangan ASN untuk 72 Orang (PNS 33 Orang dan PPPK 39 Orang), honorarium pengelola keuangan perangkat daerah serta untuk penyusunan laporan keuangan (9 dokumen) dengan anggaran sebesar Rp. 9.189.659.241,- dan terealisasi Rp. 2.744.383.968,-.
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, untuk perjalanan dinas keluar daerah dan belanja kontribusi peserta pelatihan dengan anggaran sebesar Rp. 62.662.400,- dan terealisasi Rp. 0,-.
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, untuk belanja peralatan listrik (belanja peralatan listrik, lampu, baterai, *fitting* lampu dan lain-lain), Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja ATK Kantor, *Ribbon* KTP, Film KTP, *Cleaning Kit* KTP,

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

- Ribbon KIA, Cleaning Kit KIA*), Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Mamin harian pegawai, air mineral, mamin rapat, mamin tamu), Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (cetak amplop, map, buku SPPD, banner, fotocopy dan penjilidan, cetak formulir pelayanan adminduk, blangko KIA). Selain itu juga untuk Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (belanja koran dan majalah), Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultansi SKPD (perjalanan dinas luar daerah) dari kegiatan diatas dianggarkan dengan alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.834.691.621,- dan terealisasi Rp. 1.061.261.126,-.
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah, untuk pengadaan Meja Kantor 11 Unit, lemari 9 unit, Meja rapat 13 Kursi rapat 50 unit, PC 3 unit, Printer 5 unit, perangkat soundsistem 1 unit, soundsistem 1 unit, Pengadaan Gedung sederhana dengan alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.587.021.945,- dan terealisasi Rp. 212.981.250,-.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, untuk jasa surat menyurat (BBM kurir surat, belanja paket/pengiriman), Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik (tagihan telpon, tagihan air, tagihan listrik), Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Pemeliharaan sarana kantor/printer/scanner, Pemeliharaan sarana kantor), Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (belanja alat kebersihan dan bahan pembersih, honor instruktur senam, lembur, honor Non PNS Tenaga Pelayanan Umum Kantor 6 orang, belanja Jaminan Kesehatan Non PNS, Belanja Jaminan Kematian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Non PNS), dari kegiatan diatas dianggarkan dengan alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 480.775.810,- dan terealisasi Rp. 177.026,661- .
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, untuk Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (BBM dan Pelumas, suku cadang kendaraan dinas roda 4, pajak dan STNK kendaraan dinas roda 4, ongkos balance, cuci dan pengecatan), untuk Penyediaan Jasa

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (BBM dan Pelumas Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2, suku cadang kendaraan dinas roda 4 dan roda 2, pajak dan STNK kendaraan dinas roda 2, ongkos balance, servis, pengecatan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4), untuk Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Pemeliharaan Genset, pemeliharaan CCTV, Pemeliharaan AC), untuk Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (belanja pemeliharaan gedung kantor), dari kegiatan diatas dianggarkan dengan alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 455.863.263,- dan terealisasi Rp. 69.514.381,-.

2. Program Pendaftaran Penduduk.

Pada Tahun Anggaran 2025 program ini meliputi 3 kegiatan yaitu:

a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

Untuk Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk pelayanan dokumen pendaftaran penduduk, meliputi: pembayaran honorarium Non PNS (48 orang), makanan dan minuman rapat, banner dan fotocopy, perjalanan dinas dalam daerah untuk perekaman serta lembur pegawai untuk pelayanan, belanja suku cadang printer KTP dan KIA serta perjalanan dinas untuk pengambilan blangko KTP-el. Penuntasan target/capaian dengan indikator dan target kinerja sebagai berikut :

- Perekaman KTP sebesar 99,70%.
- KIA sebesar 60%

Serta Pendukung Pelayanan administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik atau MPP, dan pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan melalui program “Cedak Mas” (Pelayanan perekaman, penerbitan KTP el, Kartu Keluarga, penerbitan KIA, Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia/SKPWNI). Selain itu juga dilaksanakan program “KTP In School”, dan program “Sayang Difabel, Lansia dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) ” serta program “Jemput Bola Sayang Anak”, Kegiatan Perekaman dan Pelayanan Adminduk di Mobil Pelayanan Keliling.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

Dukcapil memiliki 2 unit Mobile Enrollment Kit (Alat Perekaman portable yang mudah dibawa kemana saja) untuk mendukung program “Cedak Mas” (Pelayanan perekaman, penerbitan KTP el, Kartu Keluarga, penerbitan KIA, Akta Kelahiran, Akta kematian, dan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia/SKPWNI). Dan mendukung program “KTP *In School*”, dan program “Sayang Difabel, Lansia dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) untuk meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Untuk Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan, meliputi: alat kebersihan dan bahan pembersih gudang arsip, map odner untuk penyimpanan arsip, kertas HVS, fotovopy dan lembur PNS dan Non PNS serta untuk pengadaan alat penghancur kertas.

Dengan adanya map ordner untuk berkas KK dan KIA limpahan dari kecamatan yang di simpan di Dinas Dukcapi (1 dus isi 15 keping) sedangkan kita butuh 3 dus untuk 20 kecamatan (jadi map odner sangat prioritas dan masih kurang), ATK, bahan pembersih, lembur untuk pengarsipan dokumen adminduk.

dari kegiatan diatas dianggarkan dengan alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 1.468.196.606,- dan realisasi dari kegiatan ini sebesar Rp. 561.495.000,-.

b. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

Dipergunakan untuk lebih memperkenalkan beragam pelayanan kependudukan kepada masyarakat melalui pameran kependudukan pada saat Hari Jadi Tuban. anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 98.040.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.000.000,-.

c. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

Untuk Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk, kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dibidang administrasi kependudukan dilaksanakannya pendampingan dari konsultan serta audit ekstenal dari badan sertifikasi ISO 27001:2025 yang akan dilaksanakan pada triwulan III Tahun 2025 dengan belanja meliputi : honor PPTK, lembur, jasa pendampingan ISO, jasa re sertifikasi ISO, perjalanan dinas luar daerah pendampingan dan

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

re-sertifikasi ISO, perjalanan dinas dalam kota untuk monitoring, penyelenggaraan ISO/Sistem/SIAK/infrastruktur/sarana prasarana/SOP telah bersertifikat ISO 27001 Tahun 2025 tetapi masih terdapat catatan atas hasil rekomendasi ISO 27001 Tahun 2023 yang harus di tindaklanjuti yaitu pintu elektronik/sistem kartu untuk ruang server, CCTV untuk ruang server, alat pengukur suhu dan kelembaban ruangan, APAR, Lemari Arsip Ruang Server, UPS, Penangkal Petir, Rehabilitasi ruang Server, Rumah Genset ukuran 4 x 6. Dari rekomendasi tersebut yang dilaksanakan di tahun 2025 yaitu pengadaan UPS 4 unit dan 1 unit Penangkal Petir. Dari kegiatan diatas dianggarkan dengan alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 140.548.314 dan realisasi dari kegiatan ini sebesar Rp 0,-.

3. Program Pencatatan Sipil.

Pada Tahun Anggaran 2025 program ini meliputi 1 kegiatan yaitu : Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting.

Kegiatan ini ditujukan untuk Fumigasi Arsip di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, kegiatan ini sangat penting karena untuk arsip di pencatatan sipil karena arsip di pencatatan sipil adalah satu arsip untuk selamanya (arsip tidak boleh di musnahkan dan arsip ini adalah arsip abadi) jadi sangat penting untuk pemeliharaan arsip di pendatatan sipil, jadi untuk merawat arsip agar dijauhkan oleh hama yang terlihat (rayap) dan yang tidak terlihat (jamur, bakteri, amoeba dan lain2) selain itu kegiatan ini juga untuk berlanja alat tulis kantor untuk penyimpanan arsip, alat pembersih dan alat kebersihan, honorarium PPTK, Jasa Fumigasi, serta belanja lembur . Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil.

Kegiatan ini ditujukan untuk belanja fotocopy, perjalanan dinas dalam daerah, lembur, makanan dan minuman koordinasi, banner (Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara kolaborasi dengan bidang Pendaftaran Penduduk) serta pelaksanaannya dilakukan dengan cara kerjasama dengan Dinas Pendidikan, IGTKI, IGRA dan HIMPAUDI dalam rangka percepatan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai pemenuhan hak anak, untuk pelayanan dokumen adminduk di bidang pelayanan pencatatan sipil dan utuk

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

akte-akte capil yang ada di 20 kecamatan maka dilakukan keliling pengambilan berkas/arsip pengajuan pelayanan pencatatan sipil di 20 kecamatan se-Kabupaten Tuban secara terjadwal, dari kegiatan diatas dianggarkan dengan alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 205.757.966,-. Untuk kegiatan ini terealisasi sebesar Rp 22.611.500,-.

4. Program Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
Program ini pada Tahun 2025 dilaksanakan meliputi 3 kegiatan:

a. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan.

Untuk kerjasama pemanfaatan data kependudukan, terdapat belanja perjalanan dinas, mamin rapat, honor PPTK. Kegiatan ini dilaksanakan atas perintah dari kementerian dalam negeri terkait Pemanfaatan Data Kependudukan, karena sekarang semua data Kependudukan menggunakan Data SIAK terpusat, jadi apabila ada lembaga-lembaga, atau OPD yang ingin memanfaatkan data Kependudukan harus kerja sama dulu dengan Dinas Dukcapil dan sampai saat ini Agustus tahun 2025 sudah ada 6 OPD/Lembaga yang sudah kerja sama terkait pemanfaat data kependudukan diantaranya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tuban dan 5 lainnya sudah verifikasi persrtujuan perpanjangan jangka waktu oleh Kementrian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Dukcapil yaitu Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Teroadu Satu Pintu Kabupaten Tuban, Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tuban dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. R Koesma Kabupaten Tuban , dari kegiatan diatas dianggarkan dengan alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 94.983.150,- dan terealisasi Rp. 6.555.000,-.

b. Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
Untuk Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, kegiatan ini ditujukan untuk

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

pemeliharaan jaringan SIAK untuk pelayanan di Dinas Dukcapil dan 20 kecamatan, belanja VPN, lembur, pembayaran listrik tower banyu urip, pulsa paket data 23 kartu x 12 bulan x Rp.150.000,-, honorarium PPTK, pengandaan, perjalanan dinas luar daerah, perjalanan dinas dalam daerah, peralatan jaringan (ubiquiti rocket M5 radio wireless) 10 unit, dari kegiatan diatas dianggarkan dengan alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 501.898.880,- dan terealisasi Rp. 124.578.984

c. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Untuk Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan, ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas petugas pelayanan/operator SIAK Kabupaten/operator SIAK kecamatan dengan belanja mamin rapat, honorarium pptk, sewa ruangan 3 hari x Rp. 5.000.000,-, belanja lembur, perjalanan dinas dalam daerah, kegiatan bimbingan teknis Full Board (6 kegiatan x Rp. 13.835.010,-), dari kegiatan diatas dianggarkan dengan alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 159.999.900,- dan terealisasi Rp. 13.445.000,-

5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan.

Program ini pada Tahun 2025 dilaksanakan melalui 1 kegiatan:

Untuk Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota, kegiatan ini dilaksanakan untuk menyusun buku data agregat kependudukan per semester (60 buku), dan dianggarkan cetak buku agregat kependudukan, fotocopy, honorarium pptk, lembur, mamin rapat, perjalanan dinas dalam daerah.

Untuk Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain, kegiatan ini dilaksanakan untuk menyusun buku profil perkembangan pendudukan (30 buku), dan dianggarkan belanja cetak buku profil kependudukan, fotocopy, mamin rapat, honorarium PPTK, lembur, perjalanan dinas dalam daerah.

dari kegiatan diatas dianggarkan dengan alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 76.231.580,- terealisasi Rp. 14.769.400,-.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2025
Triwulan II
Table 2.1

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
				5	6	7	8	9	10	11 = 6+12	100%									
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	13
A	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan		Indeks Pelayanan Administrasi Kependudukan	0 (Poin)	0	0 (Poin)	0	91.2 (Poin)	16.518.830.676	0 (Poin)	2.733.454.444	0 (Poin)	2.294.835.100	0 (Poin)	5.028.289.544	0 (Poin)	5.031.079.544	0%	0%	
1		Program Pendaftaran Penduduk	Perekaman KTP Elektronik	99.8 (%)	12.622.987.041	99.06 (%)	9.894.560.643	99.7 (%)	1.706.784.920	99.64 (%)	286.246.000	99.66 (%)	279.049.500	99.66 (%)	565.295.500	99.66 (%)	10.459.856.143	99.86 %	82.86 %	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
			Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	65 (%)	0	48.26 (%)	0	60 (%)	0	49.52 (%)	0	51.03 (%)	0	51.03 (%)	0	51.03 (%)	0	78.51 %	0%	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
		1. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan	1350000 (Dokumen)	10.991.379.579	677490 (Dokumen)	6.088.601.486	270000 (Dokumen)	1.468.196.606	47415 (Dokumen)	286.246.000	48142 (Dokumen)	275.049.000	95557 (Dokumen)	561.295.000	95557 (Dokumen)	6.649.896.486	7.08 %	60.5 %	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
		1. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	270000 (Dokumen)	1.396.051.831	47415 (Dokumen)	286.246.000	48142 (Dokumen)	267.966.000	95557 (Dokumen)	554.212.000	95557 (Dokumen)	554.212.000	0%	0%	
		2. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	150000 (Dokumen)	72.144.775	6132 (Dokumen)	0	7302 (Dokumen)	7.083.000	13434 (Dokumen)	7.083.000	13434 (Dokumen)	7.083.000	0%	0%	Keplaa Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										22.17										
Predikat kinerja sub kegiatan										Sangat Rendah										

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II						14 = (13/5) x		
				5	6	7	8	9	10	11	100%									
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15
		2. Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kecamatan yang menyelenggarakan Pendaftaran Penduduk sesuai standar	20	1.193.607.463	20	3.548.110.703	20	98.040.000	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	3.552.110.703	0%	297.59	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
			(Kecamatan)	(Kecamatan)		(Kecamatan)		(Kecamatan)		(Kecamatan)		(Kecamatan)		(Kecamatan)		(Kecamatan)		(Kecamatan)	(Kecamatan)	
		1. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	5 (Dokumen)	183.500.000	1 (Dokumen)	143.531.000	1 (Dokumen)	98.040.000	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	4.000.000	0 (Dokumen)	4.000.000	0 (Dokumen)	147.531.000	0%	80.4 %	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										0										
Predikat kinerja sub kegiatan										Sangat Rendah										
		3. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk yang dilaksanakan	1	438.000.000	2	257.848.454	20	140.548.314	0	0	0	0	0	0	0	257.848.454	0%	58.87 %	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
			(Kecamatan)	(Kecamatan)		(Kecamatan)		(Kecamatan)		(Kecamatan)		(Kecamatan)		(Kecamatan)		(Kecamatan)		(Kecamatan)	(Kecamatan)	
		1. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	5 (Laporan)	438.000.000	3 (Laporan)	257.848.454	1 (Laporan)	140.548.314	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	257.848.454	0%	58.87 %	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										0										
Predikat kinerja sub kegiatan										Sangat Rendah										
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)										11.8										
Predikat kinerja kegiatan										Sangat Rendah										

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
																14 = (13/5) x				
				5		6		7		8		9		10		11		100%		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15
2		Program Pencatatan Sipil	Kepemilikan akta kelahiran	100 (%)	1.530.300.993	96.55 (%)	1.051.683.770	100 (%)	205.757.966	96.05 (%)	5.022.500	96.96 (%)	17.589.000	96.96 (%)	22.611.500	96.96 (%)	1.074.295.270	96.96 %	70.2 %	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
		1. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah akta pencatatan sipil yang diterbitkan , Penerbitan akta perkawinan, Penerbitan akta perceraian, Penerbitan Akta Kematian	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	26249 (Dokumen)	205.757.966	7390 (Dokumen)	4.342.500	7847 (Dokumen)	17.589.000	15237 (Dokumen)	21.931.500 (Dokumen)	21.931.500	0%	0%	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	
		1. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	26249 (Dokumen)	115.830.430	7390 (Dokumen)	0	7847 (Dokumen)	9.490.000	15237 (Dokumen)	9.490.000 (Dokumen)	9.490.000	0%	0%	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	
		2. Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	2 (Layanan)	839.301.093	2 (Layanan)	785.797.570	2 (Layanan)	89.927.536	2 (Layanan)	4.342.500	2 (Layanan)	8.099.000	2 (Layanan)	12.441.500 2 (Layanan)	798.239.070	100%	95.11 %	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										79.02										
Predikat kinerja sub kegiatan										Tinggi										
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)										58.05										
Predikat kinerja kegiatan										Rendah										

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
				5		6		7		8		9		10		11		100%		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15
3		Program Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	21.43 (%)	0	14.29 (%)	0	19.05 (%)	756.881.930	14.29 (%)	54.717.364	14.29 (%)	90.511.620	14.29 (%)	145.228.984	14.29 (%)	145.228.984	66.68	0%	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
																		%		
			persentase pengelolaan jaringan SIAK dalam kondisi baik	100 (%)	3.320.754.006	100 (%)	1.919.873.918	100 (%)	0	100 (%)	0	100 (%)	0	100 (%)	0	100 (%)	1.919.873.918	100%	57.81 %	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		1. Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah kecamatan yang terkoneksi jaringan SIAK	20	2.491.254.056	20	1.438.165.897	20	501.898.880	20	50.172.364	20	74.406.620	20	124.578.984	20	1.562.744.881	100%	62.73 %	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
				(Kecamatan)		(Kecamatan)		(Kecamatan)		(Kecamatan)		(Kecamatan)		(Kecamatan)						
		1. Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggara an Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggara an Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	5 (Dokumen)	2.491.254.056	1 (Dokumen)	1.438.165.897	1 (Dokumen)	501.898.880	1 (Dokumen)	50.172.364	1 (Dokumen)	74.406.620	1 (Dokumen)	124.578.984	1 (Dokumen)	1.562.744.881	20%	62.73 %	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										100										
Predikat kinerja sub kegiatan										Sangat Tinggi										

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II						14 = (13/5) x		
				5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		100%		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15
		2. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan yang dilaksanakan	9 (Dokumen)	160.000.000	6 (Dokumen)	108.130.271	8 (Dokumen)	94.983.150	11	3.895.000	20	2.660.000	31	6.555.000	31	114.685.271	344.44	71.68 %	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
										(Dokumen)		(Dokumen)		(Dokumen)		(Dokumen)		%		
		1. Sub Kegiatan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	9 (Dokumen)	160.000.000	6 (Dokumen)	108.130.271	8 (Dokumen)	94.983.150	4 (Dokumen)	3.895.000	8 (Dokumen)	2.660.000	8 (Dokumen)	6.555.000	8 (Dokumen)	114.685.271	88.89	71.68 %	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
																	%			
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										100										
Predikat kinerja sub kegiatan										Sangat Tinggi										
		3. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										0										
Predikat kinerja sub kegiatan										Sangat Rendah										
		4. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5 (Kali)	485.999.950	3 (Kali)	230.046.750	1 (Kali)	159.999.900	0 (Kali)	0	1 (Kali)	13.445.000	1 (Kali)	13.445.000	1 (Kali)	243.491.750	20%	50.1 %	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
		1. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	159.999.900	0 (Dokumen)	0	1 (Dokumen)	13.445.000	1 (Dokumen)	13.445.000	1 (Dokumen)	13.445.000	0%	0%	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										100										
Predikat kinerja sub kegiatan										Sangat Tinggi										
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)										75										
Predikat kinerja kegiatan										Sedang										

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
																14 = (13/5) x				
				5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		100%		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15
4		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Penyajian Data Kependudukan	100 (%)	265.252.261	100 (%)	148.583.250	100 (%)	76.231.580	150 (%)	0	150 (%)	14.769.400	150 (%)	14.769.400	150 (%)	166.142.650	150%	62.64 %	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		1. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah penyajian data kependudukan	2 (Jenis)	265.252.261	2 (Jenis)	148.583.250	2 (Jenis)	76.231.580	30 (Jenis)	0	2 (Jenis)	14.769.400	2 (Jenis)	14.769.400	2 (Jenis)	166.142.650	100%	62.64 %	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		1. Sub Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	300 (Dokumen)	194.052.261	180 (Dokumen)	107.819.250	60 (Dokumen)	40.991.420	60 (Dokumen)	0	180 (Dokumen)	12.164.401	240 (Dokumen)	12.164.401	240 (Dokumen)	122.773.651	80%	63.27 %	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		2. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan danProyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	60 (Dokumen)	35.240.160	90 (Dokumen)	0	120 (Dokumen)	2.605.000	210 (Dokumen)	2.605.000	210 (Dokumen)	2.605.000	0%	0%	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										100										
Predikat kinerja sub kegiatan										Sangat Tinggi										
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)										100										
Predikat kinerja kegiatan										Sangat Tinggi										
5		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	83.1 (Poin)	32.067.956.138	82.85 (Poin)	24.841.873.921	81.5 (Poin)	13.773.174.280	0 (Poin)	2.387.468.580	0 (Poin)	1.886.679.305	0 (Poin)	4.274.147.885	0 (Poin)	29.116.021.806	0%	90.79 %	Sekretaris Dinas
		1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	30 (Dokumen)	181.397.000	6 (Dokumen)	103.908.000	6 (Dokumen)	162.500.000	1 (Dokumen)	1.965.000	5 (Dokumen)	7.015.500	5 (Dokumen)	8.980.500	5 (Dokumen)	112.888.500	16.67 %	62.23 %	JF Perencana
		1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 (Dokumen)	0	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	103.098.300	0 (Dokumen)	0	2 (Dokumen)	7.015.500	2 (Dokumen)	7.015.500	2 (Dokumen)	7.015.500	0%	0%	JF Perencana
		2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 (Dokumen)	33.000.000	4 (Dokumen)	30.981.500	4 (Dokumen)	31.349.700	1 (Dokumen)	415.000	3 (Dokumen)	0	3 (Dokumen)	415.000	3 (Dokumen)	31.396.500	15%	95.14 %	JF Perencana
		3. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	3 (Laporan)	28.052.000	1 (Laporan)	1.550.000	3 (Laporan)	0	3 (Laporan)	1.550.000	3 (Laporan)	1.550.000	0%	0%	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										91.67										
Predikat kinerja sub kegiatan										Sangat Tinggi										

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penangu ng Jawab
										I		II								
				5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		100%		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15		
		2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	50	18.134.569.172	10	16.244.793.609	10	9.189.659.241	7 (Dokumen)	1.329.176.352	7 (Dokumen)	1.415.207.616	7 (Dokumen)	2.744.383.968	7 (Dokumen)	18.989.177.577	14%	104.71	Kasubag Keuangan
	(Dokumen)			(Dokumen)		(Dokumen)														
		1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51	17.496.206.672	47	15.986.246.109	51	9.091.735.666	44	1.319.295.352	43	1.399.807.616	43	2.719.102.968	43	18.705.349.077	84.31	106.91	Kepala Sub Bagian Keuangan
				(Orang/Bulan)		(Orang/Bulan)		(Orang/Bulan)		(Orang/Bulan)		(Orang/Bulan)								
		2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30	599.030.000	6 (Dokumen)	232.501.500	6 (Dokumen)	87.159.925	2 (Dokumen)	7.325.000	4 (Dokumen)	15.400.000	4 (Dokumen)	22.725.000	4 (Dokumen)	255.226.500	13.33	42.61	Kasubag Keuangan
				(Dokumen)																
		3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	45 (Laporan)	39.332.500	9 (Laporan)	26.046.000	9 (Laporan)	10.763.650	4 (Laporan)	2.556.000	5 (Laporan)	0	5 (Laporan)	2.556.000	5 (Laporan)	28.602.000	11.11	72.72	Kasubag Keuangan
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										68.85										
Predikat kinerja sub kegiatan										Sedang										
		3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai	80 (Orang)	173.635.000	0 (Orang)	89.800.000	80 (Orang)	62.662.400	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	89.800.000	0%	51.72 %	Kasubag Umum dan Kepegawai an
		1. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	80 (Orang)	91.135.000	0 (Orang)	9.695.000	1 (Orang)	12.407.400	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	9.695.000	0%	10.64 %	Kasubag Umum dan Kepegawai an
		2. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	91 (Paket)	50.255.000	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0%	0%	Kepala Sub Kegiatan Umum dan Kepegawai an
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										0										
Predikat kinerja sub kegiatan										Sangat Rendah										

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II						14 = (13/5) x		
																		100%		
				5	6	7	8	9	12	13 = 6+12	100%									
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15
				(Dokumen)		(Dokumen)		(Dokumen)												
		1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51	17.496.206.672	47	15.986.246.109	51	9.091.735.666	44	1.319.295.352	43	1.399.807.616	43	2.719.102.968	43	18.705.349.077	84.31	106.91	Kepala Sub Bagian Keuangan
				(Orang/Bulan)		(Orang/Bulan)		(Orang/Bulan)		(Orang/Bulan)		(Orang/Bulan)		(Orang/Bulan)		(Orang/Bulan)		%	%	
		2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30	599.030.000	6 (Dokumen)	232.501.500	6 (Dokumen)	87.159.925	2 (Dokumen)	7.325.000	4 (Dokumen)	15.400.000	4 (Dokumen)	22.725.000	4 (Dokumen)	255.226.500	13.33	42.61	Kasubag Keuangan
				(Dokumen)													%	%		
		3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	45 (Laporan)	39.332.500	9 (Laporan)	26.046.000	9 (Laporan)	10.763.650	4 (Laporan)	2.556.000	5 (Laporan)	0	5 (Laporan)	2.556.000	5 (Laporan)	28.602.000	11.11	72.72	Kasubag Keuangan
																	%	%		
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										68.85										
Predikat kinerja sub kegiatan										Sedang										
		3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai	80 (Orang)	173.635.000	0 (Orang)	89.800.000	80 (Orang)	62.662.400	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	89.800.000	0%	51.72 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		1. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	80 (Orang)	91.135.000	0 (Orang)	9.695.000	1 (Orang)	12.407.400	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	0 (Orang)	9.695.000	0%	10.64 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		2. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	91 (Paket)	50.255.000	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	0%	0%	Kepala Sub Kegiatan Umum dan Kepegawaian
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										0										
Predikat kinerja sub kegiatan										Sangat Rendah										
		4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	5 (Layanan)	9.726.054.619	5 (Layanan)	5.496.081.263	5 (Layanan)	1.834.691.621	5 (Layanan)	943.149.520	5 (Layanan)	118.111.606	5 (Layanan)	1.061.261.126	5 (Layanan)	6.557.342.389	100%	67.42 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 (Paket)	53.011.500	1 (Paket)	25.974.000	1 (Paket)	8.018.582	1 (Paket)	0	1 (Paket)	1.730.800	1 (Paket)	1.730.800	1 (Paket)	27.704.800	100%	52.26 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		100%		
		2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 (Paket)	0	0 (Paket)	0	1 (Paket)	1.288.934.752	1 (Paket)	904.541.220	1 (Paket)	36.292.285	1 (Paket)	940.833.505	1 (Paket)	940.833.505	0%	0%	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 (Paket)	399.464.500	2 (Paket)	296.746.440	1 (Paket)	114.809.159	1 (Paket)	14.367.500	1 (Paket)	16.247.521	1 (Paket)	30.615.021	1 (Paket)	327.361.461	100%	81.95 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 (Paket)	171.713.650	2 (Paket)	413.630.235	2 (Paket)	172.433.471	2 (Paket)	5.956.300	2 (Paket)	59.926.000	2 (Paket)	65.882.300	2 (Paket)	479.512.535	100%	279.25 %	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5 (Dokumen)	67.640.000	1 (Dokumen)	45.510.000	1 (Dokumen)	16.267.620	1 (Dokumen)	2.610.000	1 (Dokumen)	3.915.000	1 (Dokumen)	6.525.000	1 (Dokumen)	52.035.000	20%	76.93 %	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 (Laporan)	852.250.000	169 (Laporan)	592.891.958	30 (Laporan)	234.228.037	3 (Laporan)	13.886.000	0 (Laporan)	0	3 (Laporan)	13.886.000	3 (Laporan)	606.777.958	2%	71.2 %	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										85										
Predikat kinerja sub kegiatan										Tinggi										
		5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	18 (Unit)	300.000.000	88 (Unit)	934.013.440	5 (Unit)	1.587.021.945	0 (Unit)	0	5 (Unit)	212.981.250	5 (Unit)	212.981.250	5 (Unit)	1.146.994.690	27.78 %	382.33 %	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		1. Sub Kegiatan Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 (Unit)	10.000.000	19 (Unit)	59.800.000	83 (Unit)	95.487.000	0 (Unit)	0	83 (Unit)	94.932.750	83 (Unit)	94.932.750	83 (Unit)	154.732.750	1660 %	1547.33 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		2. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 (Unit)	60.000.000	69 (Unit)	815.212.500	16 (Unit)	161.534.945	0 (Unit)	0	9 (Unit)	118.048.500	9 (Unit)	118.048.500	9 (Unit)	933.261.000	112.5 %	1555.44 %	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		3. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	1 (Unit)	1.330.000.000	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0%	0%	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										52.08										

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II						14 = (13/5) x		
				5		6		7		8		9		12		13 = 6+12		100%		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15
		6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang	7 (Jasa)	2.048.834.590	7 (Jasa)	1.088.976.857	7 (Jasa)	480.775.810	7 (Jasa)	90.702.330	7 (Jasa)	86.324.331	7 (Jasa)	177.026.661	7 (Jasa)	1.266.003.518	100%	61.79 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 (Laporan)	52.529.650	1 (Laporan)	2.694.235	12 (Laporan)	8.516.500	3 (Laporan)	258.300	3 (Laporan)	150.900	6 (Laporan)	409.200	6 (Laporan)	3.103.435	10%	5.91 %	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 (Laporan)	1.035.338.440	27 (Laporan)	467.122.379	12 (Laporan)	187.497.600	3 (Laporan)	37.936.999	3 (Laporan)	34.569.900	6 (Laporan)	72.506.899	6 (Laporan)	539.629.278	10%	52.12 %	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		3. Sb Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 (Laporan)	102.500.000	9 (Laporan)	93.495.000	4 (Laporan)	40.450.000	1 (Laporan)	3.910.000	1 (Laporan)	2.970.000	2 (Laporan)	6.880.000	2 (Laporan)	100.375.000	10%	97.93 %	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		4. Sb Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 (Laporan)	0	0 (Laporan)	0	12 (Laporan)	244.311.710	3 (Laporan)	48.597.211	3 (Laporan)	48.633.531	6 (Laporan)	97.230.742	6 (Laporan)	97.230.742	0%	0%	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										50										
		7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	82	1.503.465.756	78	884.300.752	82	455.863.263	21	22.475.378	42	47.039.003	42	69.514.381	42	953.815.133	51.22	63.44 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
				(Dokumen)		(Dokumen)		(Dokumen)		(Dokumen)		(Dokumen)		(Dokumen)		%				
		1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 (Unit)	302.644.400	1 (Unit)	167.984.010	1 (Unit)	84.517.500	1 (Unit)	14.938.000	1 (Unit)	6.049.403	1 (Unit)	20.987.403	1 (Unit)	188.971.413	100%	62.44 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 (Unit)	593.227.750	31 (Unit)	302.863.891	31 (Unit)	166.855.700	5 (Unit)	2.087.378	17 (Unit)	37.042.100	17 (Unit)	39.129.478	17 (Unit)	341.993.369	54.84 %	57.65 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 (Unit)	118.500.000	41 (Unit)	75.603.000	40 (Unit)	54.502.500	10 (Unit)	5.450.000	24 (Unit)	3.947.500	24 (Unit)	9.397.500	24 (Unit)	85.000.500	60%	71.73 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
Predikat kinerja sub kegiatan									Rendah											

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I		II										
																					14 = (13/5) x	
										5		6									7	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15				
		4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	5 (Unit)	469.093.606	5 (Unit)	337.849.851	5 (Unit)	149.987.563	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	0 (Unit)	337.849.851	0%	72.02 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan(%)										53.71												
Predikat kinerja sub kegiatan										Rendah												
Rata-rata capaian kinerja kegiatan(%)										72.08												
Predikat kinerja kegiatan										Sedang												
Rata-rata capaian kinerja program(%)										100												
Predikat kinerja program										Sangat Tinggi												
Rata-rata capaian kinerja sasaran(%)										0												
Predikat kinerja sasaran										Sangat Rendah												
Total Rata-rata capaian kinerja Sasaran (%)										0												
Predikat kinerja Sasaran										Sangat Rendah												
Total Rata-rata capaian kinerja Program (%)										79.57												
Predikat kinerja Program										Tinggi												
Total Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)										66.53												
Predikat kinerja Kegiatan										Sedang												
Total Rata-rata capaian kinerja Sub kegiatan (%)										62.92												
Predikat kinerja Sub kegiatan										Rendah												

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

2.1.1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan:

1. Masih terdapat wajib KTP pemula yang belum melakukan perekaman KTP khususnya pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA), hal ini terjadi karena kesempatan untuk melakukan perekaman waktunya bersamaan dengan jam pelajaran.
2. Masih adanya penduduk lanjut usia, penyandang disabilitas dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang belum paham tentang pentingnya dokumen kependudukan. Mereka beranggapan tidak membutuhkan dokumen kependudukan, sehingga kepemilikan dokumen kependudukan diabaikan.
3. Banyaknya penduduk yang tidak mengupdate data kependudukannya dikarenakan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat pedesaan tentang pentingnya update dokumen kependudukan.
4. Masih adanya pasangan pengantin baru atau pasangan pengantin lama yang belum mengurus dan mengupdate dokumen Kartu Keluarga (KK) menjadi satu dan belum mengupdate data status perkawinan dalam dokumen KTP elektroniknya.
5. Masih adanya para pensiunan atau purna tugas terutama yang dulunya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum mengurus dan mengupdate dokumen Kartu Keluarga (KK) dan KTP Elektroniknya.
6. Banyak masyarakat belum sepenuhnya menyadari pentingnya mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD), meskipun IKD menawarkan kemudahan dan efisiensi dalam administrasi kependudukan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pemahaman tentang manfaat IKD, serta kendala teknis seperti kurangnya literasi digital dan aksesibilitas perangkat.
7. Rendahnya Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA), karena lembaga atau instansi lain belum mewajibkan/mempersyaratkan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).
8. Belum diberlakukannya Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai persyaratan wajib dalam pelayanan publik, seperti pendaftaran sekolah.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

9. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran sebagai bentuk perlindungan dan pengakuan negara terhadap status hukum anak tentang identitas nama, tempat dan tanggal lahir, orang tuanya, serta kewarganegaraannya.
 10. Banyaknya penduduk yang tidak mengupdate data kependudukannya dikarenakan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat pedesaan tentang pentingnya update dokumen kependudukan.
 11. Persepsi masyarakat pedesaan bahwa biaya pembuatan akta kelahiran mahal.
 12. Persepsi masyarakat pedesaan bahwa prosedur pembuatan akta kelahiran rumit.
 13. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran sebagai bentuk perlindungan dan pengakuan negara terhadap status hukum anak tentang identitas nama, tempat dan tanggal lahir, orang tuanya, serta kewarganegaraannya.
 14. Terdapat beberapa permasalahan bagi anak yang lahir diluar negeri antara lain sebagai berikut:
 - Adanya anak yang lahir diluar negeri setelah kembali ke Indonesia tidak/belum melaporkan dan belum mengajukan permohonan akta kelahirannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - Masih adanya anak yang mempunyai akta kelahiran terbitan luar negeri yang belum dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 15. Masih rendahnya perluasan perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan instansi lain.
 16. Masih adanya orang yang meninggal dan belum diajukan akta kematiannya, sehingga data yang bersangkutan belum terhapus dari database kependudukan.
- 2.1.2. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan:
1. Telah dilaksanakannya kerja sama dengan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, untuk dilaksanakan perekaman bagi pelajar SLTA yang belum melaksanakan perekaman dan belum memiliki KTP di beberapa sekolah;
 2. Telah dilaksanakannya perekaman dan penerbitan KTP/Kartu Identitas Anak (KIA) bagi penyandang disabilitas melalui

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

program Sayang Difabel di Sekolah Luar Biasa (SLB) dan di beberapa desa/kelurahan.

3. Telah dilaksanakannya program “Cedak Mas” (Cepat Dekat Masyarakat) Pelayanan perekaman, penerbitan KTP el, Kartu Keluarga, penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia/SKPWNI). Sehingga masyarakat cukup mengurus dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kecamatan.
4. Telah dilaksanakannya Program Layanan “Sayang Difabel, Lansia dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)” yaitu layanan jemput bola untuk Perekaman Difabel, Lansia dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Program layanan *door to door* “Sayang Lansia, Difabel, dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)” oleh Tim Garuda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban merupakan salah satu upaya untuk menurunkan angka kemiskinan, Kepemilikan dokumen kependudukan bagi Lansia, Difabel, dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dapat menunjang bantuan sosial dari pemerintah dapat tepat sasaran.
5. Telah dilaksanakannya layanan “KTP *In School*” yaitu layanan jemput bola untuk Perekaman di Sekolah SMA/SMK sederajat. Layanan “KTP in School” permudah Pelajar mendapatkan KTP. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban melaksanakan program layanan pembuatan KTP baru bagi pelajar yang masih duduk di bangku SMA Sederajat sebagai implementasi dari program pemkab Tuban sebagai upaya mendekatkan masyarakat dengan layanan Administrasi Kependudukan.
6. Telah dilaksanakannya Program Layanan “Keliling Sayang Anak”. Sayang anak merupakan pelayanan yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, IGTKI, IGRA dan HIMPAUDI dalam rangka percepatan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai pemenuhan hak anak-anak yang ada di Kabupaten Tuban.
7. Telah dilaksanakannya Program layanan mobil keliling yang secara resmi telah diluncurkan oleh Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, pada Rabu tanggal 6 Februari 2024 di Desa

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

Margomulyo, Kecamatan Kerek. Layanan mobil keliling ini merupakan terobosan untuk mempermudah masyarakat mengurus dokumen kependudukan. Mobil pelayanan ini digunakan untuk layanan jemput bola pelayanan administrasi kependudukan, dan sangat mendukung dalam pelayanan kepada masyarakat rentan seperti Difabel, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan Lansia karena Mobil ini dilengkapi lift untuk memudahkan lansia dan disabilitas saat perekaman e-KTP. Mobil Pelayanan Keliling ini di desain agar ramah disabilitas. Pelayanan Administrasi Kependudukan terutama jemput bola bisa selesai dalam 1x24 jam. Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dilayani dalam Pelayanan Mobil Pelayanan Keliling, seperti Perekaman e-KTP, Penerbitan e-KTP, Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran dan Akta Kematian hingga Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI). Mobil pelayanan keliling ini digunakan untuk menjangkau masyarakat hingga pelosok desa. Mobil Pelayanan bersama petugas dari Dinas Dukcapil akan jemput bola hingga ke rumah warga. Mobil pelayanan juga digunakan untuk pelayanan pada pusat keramaian public dan event/kegiatan tertentu, seperti event pada pameran hari jadi kabupaten Tuban atau pameran pembangunan dalam rangka Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan pada *event car free day*. Tujuannya menyasar masyarakat dan pelajar yang baru bisa mengurus data kependudukan diwaktu akhir pekan atau *weekend*.

8. Telah dilaksanakannya program “Bahtera Kita” (Bayi Lahir Terima Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak/KIA). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban menggagas program Bahtera Kita sebagai upaya jemput bola dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sejak diluncurkan pada Mei 2024 lalu, program tersebut mendapatkan respons positif dari masyarakat dan rumah sakit. Program ini hadir sebagai terobosan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya ibu melahirkan dan keluarganya, dalam pengurusan dokumen kependudukan seperti Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Identitas Anak (KIA) secara langsung dari rumah sakit. Disdukcapil

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

Tuban melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Dinkes P2KB Tuban, RSUD dr. R. Koesma, RSUD Ali Mansur, RS Medika Mulia, RS Nadlatul Ulama dan RS Graha Husada pada April 2024. Program ini kini telah diterapkan di seluruh Puskesmas, RSUD, dan rumah sakit swasta di Kabupaten Tuban. Pelayanan kependudukan melalui program Bahtera Kita sangat memudahkan pasien. Keluarga pasien tidak perlu datang ke kantor Dukcapil maupun kecamatan untuk mengurus dokumen kependudukan, cukup menyerahkan berkas ke petugas. Petugas memberi penjelasan dan petunjuk untuk mengisi formulir yang diperlukan. Jadi, begitu keluar dari rumah sakit, anak sudah memiliki dokumen Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), dan Kartu Keluarga (KK) terbaru. Dengan adanya program ini menjadikan keluarga bisa fokus merawat anak dan ibu usai melahirkan tanpa perlu pusing mengurus dokumen kependudukan. Program Bahtera Kita merupakan komitmen Disdukcapil Tuban untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan Bahtera Kita, data kelahiran anak dapat langsung tercatat dan terintegrasi dalam sistem kependudukan. Serta memastikan setiap anak yang lahir segera memiliki identitas hukum yang sah.

- 9. Telah dilaksanakannya program “Pak Tama” (Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Wredatama). Dinas Dukcapil Kabupaten Tuban resmi menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Wredatama (Pensiunan Pegawai Negeri Sipil) Kab. Tuban pada Bulan Februari Tahun 2025. Kolaborasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi para purna tugas, sebagai bentuk penghormatan dan dedikasi bagi mereka yang telah mengabdikan.
- 10. Telah dilaksanakannya program “Pelangi Biru” (Pembaharuan Langsung Identitas bagi Pengantin Baru). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban dan Kementerian Agama Kabupaten Tuban resmi menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk Program Inovasi “Pelangi Biru” pada Tahun 2025. Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini adalah untuk mempermudah pengurusan dokumen kependudukan bagi

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

pasangan pengantin baru. Selain mendapatkan dokumen buku nika dan kartu nikah digital, pasangan pengantin baru juga mendapatkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) secara bersamaan setelah prosesi pernikahan selesai.

- 11. Telah dilaksanakannya program layanan “Mitra KIA” yaitu layanan memaksimalkan manfaat dari Kartu Identitas Anak (KIA) dengan melakukan kerja sama dengan pelaku usaha di Kab. Tuban. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban melakukan inovasi terbaru dengan berkolaborasi Bersama dengan pihak pelaku usaha yang berada di wilayah Kab. Tuban sebagai Mitra KIA. Setiap anak yang memiliki KIA berhak mendapatkan potongan biaya layanan atau potongan harga, dengan rentang diskon mulai dari 5 hingga 30 persen. Pelaku usaha tersebut diantaranya: Laboratorium Klinik Populer, Manunggal Sport Center, Pahlawan Swimming Pool, dan Yenni’s Cake, Level Playground Tuban, Barudak Café, Rumah Sunnat Tuban.
- 12. Telah dilaksanakannya Program Layanan Keliling Identitas Kependudukan Digital (IKD), Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital, bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses pengurusan dokumen kependudukan serta meningkatkan kepuasan masyarakat. Aplikasi digital memungkinkan pengurusan KTP, Kartu Keluarga, dan akta kelahiran dari mana saja dan kapan saja. Cakupan Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah digitalisasi data kependudukan yang diakses melalui aplikasi khusus di perangkat seluler. IKD mencakup data KTP-el, Kartu Keluarga (KK), biodata penduduk, akta pencatatan sipil, dan surat keterangan kependudukan. Dengan IKD, masyarakat tidak perlu membawa KTP fisik karena semua informasi kependudukan sudah tersedia secara digital. Dalam rangka pemenuhan target aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban melakukan inisiatif “Jemput Bola” baik dari sektor pemerintah atau swasta.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

13. Telah dilaksanakannya Program layanan mobil keliling yang secara resmi telah dilaunching Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, pada Rabu tanggal 6 Februari 2024 di Desa Margomulyo, Kecamatan Kerek. Mobil layanan ini merupakan terobosan untuk mempermudah masyarakat mengurus dokumen kependudukan. Mobil pelayanan ini digunakan untuk layanan jemput bola pelayanan administrasi kependudukan, dan sangat mendukung dalam pelayanan kepada masyarakat rentan seperti Difabel, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan Lansia karena Mobil ini dilengkapi lift untuk memudahkan lansia dan disabilitas saat perekaman e-KTP. Mobil Pelayanan Keliling ini di desain agar ramah disabilitas. Pelayanan Administrasi Kependudukan terutama jemput bola bisa selesai dalam 1x24 jam. Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dilayani dalam Pelayanan Mobil Pelayanan Keliling, seperti Perekaman e-KTP, Penerbitan e-KTP, Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran dan Akta Kematian hingga Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWN). Mobil pelayanan keliling ini digunakan untuk menjangkau masyarakat hingga pelosok desa. Mobil Pelayanan bersama petugas dari Dinas Dukcapil akan jemput bola hingga ke rumah warga. Mobil pelayanan juga digunakan untuk pelayanan pada pusat keramaian public dan event/kegiatan tertentu, seperti event pada pameran hari jadi kabupaten Tuban atau pameran pembangunan dalam rangka Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan pada *event car free day*. Tujuannya menyasar masyarakat dan pelajar yang baru bisa mengurus data kependudukan diwaktu akhir pekan atau *weekend*.
14. Telah dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Instansi Lain; Sampai dengan bulan Agustus 2025 kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan sudah realisasi dengan 6 OPD (Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Rumah Sakit dr. R. Koesma, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

dan Perikanan. Kegiatan ini dilaksanakan atas perintah dari kementerian dalam negeri terkait Pemanfaatan Data Kependudukan, karena sekarang semua data Kependudukan menggunakan Data SIAK terpusat, jadi apabila ada lembaga-lembaga, atau OPD yang ingin memanfaatkan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus melaksanakan MOU atau kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban.

15. Telah dilaksanakannya pemahaman kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi administrasi kependudukan karena masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat pedesaan tentang pentingnya update dokumen kependudukan.
16. Telah dilaksanakannya Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pelayanan melalui bimbingan teknis dan pengembangan lainnya melalui inovasi pelayanan secara terus menerus dan berkelanjutan.
17. Telah dilaksanakannya sosialisasi dan pemberian buku register laporan kematian untuk semua desa/kelurahan agar diisi oleh petugas registrasi desa/kelurahan dan sekaligus untuk diajukan permohonan akta kematian agar data yang bersangkutan terhapus dari database kependudukan.
18. Telah dilaksanakannya konsolidasi Nomor Induk Kependudukan KTP/KK yang belum ter-update secara realtime ke server pusat.
19. Telah dilaksanakannya peningkatan sarana dan prasarana pelayanan melalui pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana;
20. Telah dilaksanakannya standar manajemen mutu melalui sertifikasi ISO bidang pelayanan secara rutin setiap tahun.
21. Telah dilaksanakannya peningkatan penyimpanan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil baik secara fisik maupun digitalisasi.
22. Telah dilaksanakannya peningkatan jaringan SIAK yang saat ini sudah sampai di kecamatan agar dalam kondisi baik dalam menunjang pelayanan.
23. Telah dilaksanakannya sosialisasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara langsung serta melalui media cetak dan elektronik.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

2.1.3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban Tahun 2024 adalah Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima di Bidang Administrasi Kependudukan, dengan Indikator Indeks Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan (Indeks Kepuasan Masyarakat). Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024 sebesar 91, dengan realisasi Tahun 2024 sebesar 91,26.

Sedangkan Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban Tahun 2024 adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan, dengan Indikator Indeks Pelayanan Administrasi Kependudukan (Indeks Kepuasan Masyarakat). Indikator Sasaran dan Tujuan dari Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sama, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024 sebesar 91, dengan realisasi Tahun 2024 sebesar 91,26.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tuban telah mencapai hasil yang baik dan progres yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa capaian Program berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap kepuasan terhadap masyarakat.

2.1.4. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi terget kinerja program/kegiatan.

- 1. Kebijakan dan tindakan perencanaan.
 - a. Analisis dan evaluasi kinerja sebelumnya.

Melakukan analisis mendalam terhadap faktor-faktor penyebab ketidaksesuaian target kinerja di masa lalu, baik itu karena faktor internal (misalnya perencanaan yang tidak realistis) atau eksternal (misalnya perubahan kondisi atau bencana alam).
 - b. Penetapan target yang realistis.

Menetapkan target kinerja yang lebih realistis dan terukur berdasarkan analisis tersebut, yang juga memperhitungkan sumber daya yang tersedia dan kondisi aktual.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

- c. Perencanaan yang fleksibel.
Membuat perencanaan yang memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kondisi yang berubah, misalnya dengan memasukkan opsi-opsi alternatif. Ini dapat dilakukan melalui perubahan Rencana Kerja (Renja) jika diperlukan.
 - d. Penguatan koordinasi dan komunikasi.
Memastikan adanya komunikasi yang efektif antar unit pelaksana dan pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi dan langkah kerja.
2. Tindakan penganggaran.
- a. Alokasi anggaran yang tepat sasaran.
Mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas program yang paling membutuhkan atau program yang memiliki potensi terbesar untuk mencapai target kinerja.
 - b. Revisi anggaran.
Melakukan penyesuaian anggaran jika diperlukan berdasarkan evaluasi kinerja. Jika target tidak tercapai, mungkin diperlukan pengalokasian anggaran tambahan atau realokasi dari program lain. Sebaliknya, jika target terlampaui, anggaran yang lebih efisien mungkin bisa dialihkan ke program lain.
 - c. Anggaran berbasis kinerja.
Menggunakan anggaran yang berbasis kinerja untuk memastikan setiap alokasi anggaran memiliki tujuan yang jelas dan terukur dalam mencapai target kinerja.
3. Tindakan pemantauan dan evaluasi
- a. Pemantauan berkala.
Melakukan pemantauan kinerja secara berkala untuk mendeteksi lebih dini jika ada penyimpangan dari target yang sudah ditetapkan.
 - b. Mekanisme evaluasi.
Memperkuat mekanisme evaluasi kinerja secara periodik untuk mengevaluasi efektivitas program dan mengidentifikasi kendala yang mungkin muncul, serta memberikan umpan balik untuk perbaikan di masa mendatang.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya telah melaksanakan program dan kegiatannya dengan baik. Adapun indikator kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 yaitu Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah, sedangkan Target Indeks Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan pada Tahun 2024 adalah sebesar 91, dan setelah dilaksanakan hasil survei independen yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban (Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Tuban) dengan bekerja sama dengan lembaga mitra), capaian indikator kinerja indeks pelayanan administrasi kependudukan pada Tahun 2024 melebihi capaian target yang ditetapkan dengan nilai **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 91,26** dengan **nilai mutu “A”** dan kategori kinerja pelayanan **“Sangat Baik”**.

Dengan melihat capaian tersebut, dan sudah menjadi komitmen bersama dari pimpinan sampai segenap bawahan bahwa pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban ini akan terus dipertahankan serta ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang dengan berbagai inovasi dan terobosan yang selalu akan dilakukan guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Tuban.

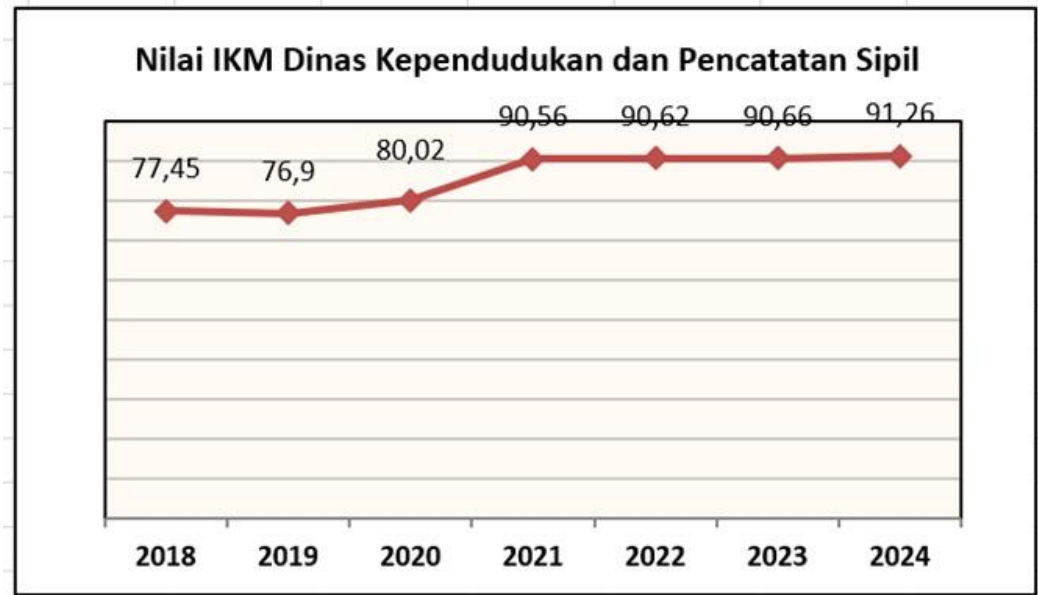
Pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil saat ini telah dilaksanakan di Mal Pelayanan Publik dengan kondisi yang sangat representatif diharapkan akan semakin memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang akan mengurus dokumen kependudukannya. Selain pelayanan di Mal Pelayanan Publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan melalui program “Layanan Cedak Mas/Cepat Dekat Masyarakat” yaitu (pelayanan perekaman, penerbitan KTP el, penerbitan KIA, Akta Kelahiran, Akta kematian). Selain itu juga dilaksanakan program “Layanan Keliling KTP *in school*”, program “Layanan Keliling Sayang Difabel, Lansia, dan ODGJ” dan program “Layanan Keliling Jemput Bola Sayang Anak” serta program “Layanan Bahtera Kita” (Bayi Lahir Terima Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak/KIA).

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

Selain Program Layanan Cedak Mas, Layanan Keliling KTP *in school*, Layanan Keliling Sayang Lansia Difabel dan ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), dan Layanan Program Bahtera Kita, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban juga mempunyai program untuk Pelayanan Peningkatan Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), yaitu program Layanan Mitra KIA, Layanan Mobil Keliling, Layanan Keliling Identitas Kependudukan Digital (IKD), Layanan Administrasi Kependudukan bagi Wredatama (Layanan Pak Tama), dan Layanan Pembaruan Langsung Identitas bagi Pengantin Baru (Pelangi Biru).

Gambar 3.1

Perkembangan Nilai Indeks Pelayanan Administrasi Kependudukan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2018-2024



Gambar 3.1 menunjukkan perkembangan nilai indeks pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari Tahun 2018 adalah 77,45 pada Tahun 2019 turun menjadi 76,90, Tahun 2020 meningkat lagi menjadi 80,02, bahkan pada Tahun 2021 ini nilainya meningkat signifikan menjadi 90,56, Tahun 2022 naik menjadi 90,62. Pada Tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi nilai 90,66 dan pada tahun 2024 kembali mengalami peningkatan kembali pada angka 91,26

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tuban

No	Indikator	SPM/ Standar Nasiona 1	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2023 (Tahun n- 2)	Tahun 2024 (Tahun n- 1)	Tahun 2025 (Tahun n)	Tahun 2026 (Tahun n+1)	Tahun 2023 (Tahun n-2)	Tahun 2024 (Tahun n-1)	Tahun 2025 (Tahun n)	Tahun 2026 (Tahun n+1)	
1.	Tujuan OPD: Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien Indikator Tujuan: Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	-	n/a	n/a	4,71	4,72	n/a	4,70	4,71	4,72	
2.	Sasaran OPD 1: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Indikator Sasaran 1: Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	-	n/a	n/a	4,71	4,72	n/a	4,70	4,71	4,72	
3.	Sasaran OPD 2: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Indikator Sasaran 2: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	-	90,90	91,00	91,76	92,26	90,66	91,26	91,76	92,26	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

1. Dampak dari permasalahan dan hambatan dalam menyelenggarakan tupoksi PD terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM, dan SDGs (Suistanable Development Goals) : Tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tentunya tidak terlepas dari pencapaian visi dan misi kepala daerah. Visi Kepala Daerah adalah “Mbangun Desa Noto Kutho, Kolaborasi, Inovasi, Karya, Lanjutkan! Untuk Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, dan Berkelanjutan.” serta mengacu pada Misi Ke-4 yaitu “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Akuntabel, Responsif, dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital serta menguatkan Sistem Pengawasan yang Efektif”.

Dampak dari permasalahan dan hambatan dalam menyelenggarakan tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di bidang Pendaftaran Penduduk.

- Wajib KTP belum semua melakukan perekaman dan memiliki KTP elektronik. Pada akhir tahun 2024 dari wajib KTP 985.991 orang, sejumlah 985.977 orang yang telah melakukan perekaman atau 99,99 %. Dan dari jumlah tersebut yang telah memiliki KTP elektronik baru 982.090 orang atau 99,60%.
- Kepemilikan Kartu Identitas Anak bagi anak usia 0 sampai 17 tahun (kurang 1 hari) yaitu 48,40 % atau 135.732. Adapun jumlah anak usia 0 sampai 17 tahun (kurang 1 hari) sejumlah 280.415 anak.
- Masih terdapat wajib KTP pemula yang belum melakukan perekaman KTP khususnya pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA), hal ini terjadi karena kesempatan untuk melakukan perekaman waktunya bersamaan dengan jam pelajaran.
- Masih adanya penduduk lanjut usia, penyandang disabilitas dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang belum paham tentang pentingnya dokumen kependudukan. Mereka beranggapan tidak membutuhkan dokumen kependudukan, sehingga kepemilikan dokumen kependudukan diabaikan.
- Banyaknya penduduk yang tidak mengupdate data kependudukannya dikarenakan masih rendahnya tingkat

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

kesadaran masyarakat pedesaan tentang pentingnya update dokumen kependudukan.

- Masih adanya pasangan pengantin baru atau pasangan pengantin lama yang belum mengurus dan mengupdate dokumen Kartu Keluarga (KK) menjadi satu dan belum mengupdate data status perkawinan dalam dokumen KTP elektroniknya.
- Masih adanya para pensiunan atau purna tugas terutama yang dulunya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum mengurus dan mengupdate dokumen Kartu Keluarga (KK) dan KTP Elektroniknya.
- Rendahnya Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA), karena lembaga atau instansi lain belum mewajibkan/mempersyaratkan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).
- Belum diberlakukannya Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai persyaratan wajib dalam pelayanan publik, seperti pendaftaran sekolah.
- Banyaknya penduduk yang tidak mengupdate data kependudukannya dikarenakan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat pedesaan tentang pentingnya update dokumen kependudukan.

Dampak dari permasalahan dan hambatan dalam menyelenggarakan tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil :

- Kepemilikan akta capil belum optimal. Kepemilikan akta kelahiran usia 0 -18 tahun pada akhir tahun 2024 sekitar 96,34 % atau 280.265 orang dari sejumlah 290.923 orang.
- Perlu adanya penyimpanan dokumen yang baik sekaligus digitalisasinya.
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran sebagai bentuk perlindungan dan pengakuan negara terhadap status hukum anak tentang identitas nama, tempat dan tanggal lahir, orang tuanya, serta kewarganegaraannya.
- Persepsi masyarakat pedesaan bahwa biaya pembuatan akta kelahiran mahal.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

- Persepsi masyarakat pedesaan bahwa prosedur pembuatan akta kelahiran rumit.
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran sebagai bentuk perlindungan dan pengakuan negara terhadap status hukum anak tentang identitas nama, tempat dan tanggal lahir, orang tuanya, serta kewarganegaraannya.
- Terdapat beberapa permasalahan bagi anak yang lahir diluar negeri antara lain sebagai berikut:
 - Adanya anak yang lahir diluar negeri setelah kembali ke Indonesia tidak/belum melaporkan dan belum mengajukan permohonan akta kelahirannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - Masih adanya anak yang mempunyai akta kelahiran terbitan luar negeri yang belum dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Masih adanya orang yang meninggal dan belum diajukan akta kematiannya, sehingga data yang bersangkutan belum terhapus dari database kependudukan.

Dampak dari permasalahan dan hambatan dalam menyelenggarakan tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan:

- Mulai Tahun 2022 mulai diberlakukan SIAK terpusat sehingga perlu waktu untuk penyesuaian.
- Jaringan SIAK yang ada memerlukan pemeliharaan yang intensif dan optimal karena apabila jaringan SIAK mengalami gangguan maka pelayanan terganggu.
- Terwujudnya data kependudukan yang valid dan up to date termasuk data penerima manfaat program di semua OPD Kab. Tuban.
- Banyak masyarakat belum sepenuhnya menyadari pentingnya mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD), meskipun IKD menawarkan kemudahan dan efisiensi dalam administrasi kependudukan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pemahaman tentang manfaat IKD, serta kendala teknis seperti kurangnya literasi digital dan aksesibilitas perangkat.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

Dampak dari permasalahan dan hambatan dalam menyelenggarakan tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan:

- Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan semakin tinggi untuk itu diperlukan inovasi pelayanan yang terus menerus.
- Diperlukan sinergitas dengan instansi/OPD yang memanfaatkan database kependudukan.
- Masih perlunya peningkatan perluasan perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan instansi lain karena sampai dengan bulan Agustus 2025 kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan baru realisasi dengan 6 OPD (Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Rumah Sakit dr. R. Koesma, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan).
- Masih perlunya peningkatan program layanan “Mitra KIA” yaitu layanan memaksimalkan manfaat dari Kartu Identitas Anak (KIA) dengan melakukan kerja sama dengan pelaku usaha di Kab. Tuban. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban melakukan inovasi terbaru dengan berkolaborasi Bersama dengan pihak pelaku usaha yang berada di wilayah Kab. Tuban sebagai Mitra KIA. Sampai dengan saat ini pelaku usaha yang sudah melaksanakan kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut: Laboratorium Klinik Populer, Manunggal Sport Center, Pahlawan Swimming Pool, dan Yenni’s Cake, Level Playground Tuban, Barudak Café, Rumah Sunnat Tuban.

2. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah:

- a. Peningkatan kualitas kelancaran percepatan kemudahan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.
- b. Peningkatan kualitas aparatur pelayanan administasi kependudukan di semua tempat pelayanan sehingga terwujud pelayanan yang membahagiakan masyarakat.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

- c. Terwujudnya data kependudukan yang valid dan *up to date* termasuk data penerima manfaat program di semua OPD Kab. Tuban.
 - d. Peningkatan kesadaran, pemahaman dan partisipasi masyarakat tentang administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 - e. Penuntasan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi semua penduduk/khususnya penduduk rentan administrasi kependudukan.
 - f. Mendekatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan Kepada Masyarakat.
 - g. Peningkatan Kerjasama dan Pelayanan dengan OPD/ Badan/Lembaga/Instansi lain.
3. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- a. Meningkatkan pelayanan administrasi dokumen kependudukan bagi masyarakat di Mal Pelayanan Publik dan kecamatan melalui program “Cedak Mas” (Cepat Dekat Masyarakat) Pelayanan perekaman, penerbitan KTP el, Kartu Keluarga, penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia/SKPWNI). Sehingga masyarakat cukup mengurus dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kecamatan.
 - b. Meningkatkan pelaksanaan program “Bahtera Kita” (Bayi Lahir Terima Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak/KIA). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban menggagas program Bahtera Kita sebagai upaya jemput bola dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sejak diluncurkan pada Mei 2024 lalu, program tersebut mendapatkan respons positif dari masyarakat dan rumah sakit. Program ini hadir sebagai terobosan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya ibu melahirkan dan keluarganya, dalam pengurusan dokumen kependudukan seperti Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Identitas Anak (KIA) secara langsung dari rumah sakit.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

Disdukcapil Tuban melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Tuban, RSUD dr. R. Koesma, RSUD Ali Mansur, RS Medika Mulia, RS Nadlatul Ulama dan RS Graha Husada pada April 2024. Program ini kini telah diterapkan di seluruh Puskesmas, RSUD, dan Rumah Sakit Swasta di Kabupaten Tuban. Pelayanan kependudukan melalui program Bahtera Kita sangat memudahkan pasien. Keluarga pasien tidak perlu datang ke kantor Dukcapil maupun kecamatan untuk mengurus dokumen kependudukan, cukup menyerahkan berkas ke petugas. Petugas memberi penjelasan dan petunjuk untuk mengisi formulir yang diperlukan. Jadi, begitu keluar dari rumah sakit, anak sudah memiliki dokumen Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), dan Kartu Keluarga (KK) terbaru. Dengan adanya program ini menjadikan keluarga bisa fokus merawat anak dan ibu usai melahirkan tanpa perlu pusing mengurus dokumen kependudukan. Program Bahtera Kita merupakan komitmen Disdukcapil Tuban untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya program “Bahtera Kita”, data kelahiran anak dapat langsung tercatat dan terintegrasi dalam sistem kependudukan. Serta memastikan setiap anak yang lahir segera memiliki identitas hukum yang sah.

- c. Meningkatkan pelaksanaan program “Pak Tama” (Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Wredatama). Dinas Dukcapil Kabupaten Tuban resmi menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Wredatama (Pensiunan Pegawai Negeri Sipil) Kab. Tuban pada Bulan Februari Tahun 2025. Kolaborasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi para purna tugas, sebagai bentuk penghormatan dan dedikasi bagi mereka yang telah mengabdikan.
- d. Meningkatkan pelaksanaan program “Pelangi Biru” (Pembaharuan Langsung Identitas bagi Pengantin Baru). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban dan Kementerian Agama Kabupaten Tuban resmi menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk Program Inovasi “Pelangi Biru” pada Tahun 2025. Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

(PKS) ini adalah untuk mempermudah pengurusan dokumen kependudukan bagi pasangan pengantin baru. Selain mendapatkan dokumen buku nika dan kartu nikah digital, pasangan pengantin baru juga mendapatkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) secara bersamaan setelah prosesi pernikahan selesai.

- e. Meningkatkan program layanan “Mitra KIA” yaitu layanan memaksimalkan manfaat dari Kartu Identitas Anak (KIA) dengan melakukan kerja sama dengan pelaku usaha di Kab. Tuban. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban melakukan inovasi terbaru dengan berkolaborasi Bersama dengan pihak pelaku usaha yang berada di wilayah Kab. Tuban sebagai Mitra KIA. Setiap anak yang memiliki KIA berhak mendapatkan potongan biaya layanan atau potongan harga, dengan rentang diskon mulai dari 5 hingga 30 persen. Pelaku usaha tersebut diantaranya: Laboratorium Klinik Populer, Manunggal Sport Center, Pahlawan Swimming Pool, dan Yenni’s Cake, Level Playground Tuban, Barudak Café, Rumah Sunnat Tuban.
- f. Meningkatkan Program Layanan Keliling Identitas Kependudukan Digital (IKD), Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital, bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses pengurusan dokumen kependudukan serta meningkatkan kepuasan masyarakat. Aplikasi digital memungkinkan pengurusan KTP, Kartu Keluarga, dan akta kelahiran dari mana saja dan kapan saja. Cakupan Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah digitalisasi data kependudukan yang diakses melalui aplikasi khusus di perangkat seluler. IKD mencakup data KTP-el, Kartu Keluarga (KK), biodata penduduk, akta pencatatan sipil, dan surat keterangan kependudukan. Dengan IKD, masyarakat tidak perlu membawa KTP fisik karena semua informasi kependudukan sudah tersedia secara digital. Dalam rangka pemenuhan target aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban melakukan inisiatif “Jemput Bola” baik dari sektor pemerintah atau swasta.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

- g. Meningkatkan Perluasan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Instansi Lain; Sampai dengan bulan Agustus 2025 kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan sudah realisasi dengan 6 OPD (Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Rumah Sakit dr. R. Koesma, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan. Kegiatan ini dilaksanakan atas perintah dari kementerian dalam negeri terkait Pemanfaatan Data Kependudukan, karena sekarang semua data Kependudukan menggunakan Data SIAK terpusat, jadi apabila ada lembaga-lembaga, atau OPD yang ingin memanfaatkan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus melaksanakan MOU atau kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban.
- h. Meningkatkan pelaksanaan kerja sama dengan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk pelaksanaan perekaman bagi pelajar SLTA yang belum melaksanakan perekaman dan belum memiliki KTP di beberapa sekolah;
- i. Meningkatkan pelaksanaan perekaman dan penerbitan KTP/Kartu Identitas Anak (KIA) bagi penyandang disabilitas melalui program Sayang Difabel di Sekolah Luar Biasa (SLB) dan di beberapa desa/kelurahan.
- j. Meningkatkan program layanan “KTP *In School*” yaitu layanan jemput bola untuk Perekaman di Sekolah SMA/SMK sederajat. Layanan “KTP *in School*” permudah Pelajar mendapatkan KTP. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban melaksanakan progam layanan pembuatan KTP baru bagi pelajar yang masih duduk di bangku SMA Sederajat sebagai implementasi dari program pemkab Tuban sebagai upaya mendekatkan masyarakat dengan layanan Administrasi Kependudukan.
- k. Meningkatkan Program Layanan “Sayang Difabel, Lansia dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)” yaitu layanan jemput bola untuk Perekaman Difabel, Lansia dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Program layanan *door to door* “Sayang

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

Lansia, Difabel, dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)” oleh Tim Garuda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban merupakan salah satu upaya untuk menurunkan angka kemiskinan, Kepemilikan dokumen kependudukan bagi Lansia, Difabel, dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dapat menunjang bantuan sosial dari pemerintah dapat tepat sasaran.

- 1. Meningkatkan Program Layanan “Keliling Sayang Anak”. Sayang anak merupakan pelayanan yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, IGTKI, IGRA dan HIMPAUDI dalam rangka percepatan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai pemenuhan hak anak-anak yang ada di Kabupaten Tuban.
- m. Meningkatkan Program layanan mobil keliling yang secara resmi telah diluncurkan oleh Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, pada Rabu tanggal 6 Februari 2024 di Desa Margomulyo, Kecamatan Kerek. Layanan mobil keliling ini merupakan terobosan untuk mempermudah masyarakat mengurus dokumen kependudukan. Mobil pelayanan ini digunakan untuk layanan jemput bola pelayanan administrasi kependudukan, dan sangat mendukung dalam pelayanan kepada masyarakat rentan seperti Difabel, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan Lansia karena Mobil ini dilengkapi lift untuk memudahkan lansia dan disabilitas saat perekaman e-KTP. Mobil Pelayanan Keliling ini di desain agar ramah disabilitas. Pelayanan Administrasi Kependudukan terutama jemput bola bisa selesai dalam 1x24 jam. Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dilayani dalam Pelayanan Mobil Pelayanan Keliling, seperti Perekaman e-KTP, Penerbitan e-KTP, Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran dan Akta Kematian hingga Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI). Mobil pelayanan keliling ini digunakan untuk menjangkau masyarakat hingga pelosok desa. Mobil Pelayanan bersama petugas dari Dinas Dukcapil akan jemput bola hingga ke rumah warga. Mobil pelayanan juga digunakan untuk pelayanan pada pusat keramaian public dan event/kegiatan tertentu, seperti event pada pameran hari jadi kabupaten Tuban atau pameran pembangunan dalam rangka Peringatan Hari Kemerdekaan

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

Republik Indonesia dan pada event car free day. Tujuannya menyasar masyarakat dan pelajar yang baru bisa mengurus data kependudukan diwaktu akhir pekan atau *weekend*.

- n. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur pelayanan melalui bimbingan teknis dan pengembangan lainnya melalui inovasi pelayanan secara terus menerus dan berkelanjutan.
- o. Meningkatkan konsolidasi Nomor Induk Kependudukan KTP/KK yang belum ter-update secara realtime ke server pusat.
- p. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan melalui pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana.
- q. Meningkatkan standar manajemen mutu melalui sertifikasi ISO bidang pelayanan secara rutin setiap tahun.
- r. Meningkatkan kesadaran, pemahaman dan partisipasi masyarakat tentang administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui sosialisasi dikarenakan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat pedesaan tentang pentingnya update dokumen kependudukan.
- s. Meningkatkan penyimpanan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil baik secara fisik maupun digitalisasi.
- t. Meningkatkan jaringan SIAK yang saat ini sudah sampai di kecamatan agar dalam kondisi baik dalam menunjang pelayanan.
- u. Meningkatkan sosialisasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara langsung serta melalui media cetak dan elektronik.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal P-RKPD.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban merupakan kegiatan yang bersifat prioritas serta terus menerus, baik yang bersifat rutin maupun teknis karena ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu untuk memenuhi dokumen kependudukan bagi masyarakat Kabupaten Tuban.

Beberapa hal yang menjadi alasan Analisis kebutuhan berbeda dengan P-RKPD 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menyesuaikan perencanaan dengan hasil analisis kebutuhan yang lebih realistis.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

Setelah dilakukan analisis kebutuhan, ditemukan bahwa beberapa program atau kegiatan dalam rancangan awal RKPD memiliki cakupan yang terlalu luas atau belum menjadi prioritas mendesak, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi anggaran.

- b. Adanya efisiensi dan optimalisasi penggunaan anggaran. Penurunan nilai anggaran terjadi sebagai upaya efisiensi agar sumber daya keuangan daerah digunakan secara optimal hanya untuk kegiatan yang benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Menjaga konsistensi dengan kemampuan keuangan daerah. Hasil analisis kebutuhan seringkali menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara rencana program awal dengan kemampuan fiskal daerah. Oleh karena itu, dilakukan penyesuaian besaran anggaran agar tetap seimbang dengan kondisi keuangan yang tersedia.
- d. Sebagai bentuk prioritas program dan kegiatan. Melalui proses perbandingan, program yang dianggap kurang mendesak atau tidak sesuai dengan kebutuhan utama masyarakat dapat ditunda atau dikurangi anggarannya, sementara program prioritas tetap dipertahankan dengan dukungan pendanaan yang memadai.
- e. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah.

Penurunan nilai anggaran bukan berarti mengurangi kinerja, tetapi sebagai langkah strategis agar perencanaan lebih fokus, efisien, dan mampu menghasilkan output serta outcome yang lebih berkualitas.

Berdasarkan Rancangan Awal P-RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2025 disajikan perbandingan antara Rancangan P-RKPD dan Hasil Analisis Kebutuhan OPD sebagaimana tabel berikut ini:

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal P-RKPD Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan P-RKPD 2025					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Kabupaten Tuban	Nilai AKIP Perangkat Daerah (poin)	81,5	13.773.174.280	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Kabupaten Tuban	Nilai AKIP Perangkat Daerah (poin)	83,35	12.937.872.462	Perubahan Target kinerja
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Tuban	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	6 dokumen	162.500.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Tuban	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	6 dokumen	101.344.900	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Tuban	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	103.098.300	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Tuban	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	62.045.800	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Tuban	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	31.349.700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Tuban	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	16.936.100	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Tuban	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	3 laporan	28.052.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Tuban	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	3 laporan	22.363.000	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

			Perangkat Daerah					Perangkat Daerah			
2.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Tuban	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	10 dokumen	9.189.659.241	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Tuban	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	10 dokumen	7.864.360.392	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Tuban	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 orang/Bulan	9.091.735.666	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Tuban	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 orang/Bulan	7.775.413.942	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Tuban	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 dokumen	87.159.925	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Tuban	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 dokumen	81.238.650	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Kabupaten Tuban	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	9 laporan	10.637.650	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Kabupaten Tuban	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	9 laporan	8.707.800	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

	Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Seme steran SKPD		Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD			Bulanan/Triw ulanan/Semes teran SKPD		Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Seme steran SKPD			
3.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Tuban	Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai	2 orang	62.662.400	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Tuban	Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai	51 orang	4.151.200	
	Pengadaan pakaian dinas	Kabupaten Tuban	Jumlah paket yang di terima	1	50.255.000	Pengadaan pakaian dinas	Kabupaten Tuban	Jumlah paket yang di terima	1	976.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Kabupaten Tuban	Jumlah Pegawai Berdasarkan	2 orang	12.407.400	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Kabupaten Tuban	Jumlah Pegawai Berdasarkan	2 orang	3.175.200	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

	Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			
4.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Tuban	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	5 Layanan	1.834.691.621	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Tuban	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	5 Layanan	1.546.656.637	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Tuban	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.018.582	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Tuban	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.018.582	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Tuban	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	1 Paket	1.288.934.752	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Tuban	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1 Paket	1.161.275.667	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

			Kantor yang Disediakan					Disediakan			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Tuban	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	114.809.159	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Tuban	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	114.364.159	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Tuban	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	172.433.471	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Tuban	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	146.207.481	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Tuban	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	16.267.620	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Tuban	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	16.267.620	
	Penyelenggaraan Rapat	Kabupaten Tuban	Jumlah Laporan	20	234.228.037	Penyelenggaraan Rapat	Kabupaten Tuban	Jumlah Laporan	20	100.523.128	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tuban	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan		Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tuban	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan		
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Tuban	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	31 unit	1.587.021.945	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Tuban	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	36 unit	2.482.873.760	
	Pengadaan mebel	Kabupaten Tuban	jumlah paket mebel yang disediakan	19 unit	95.487.000	Pengadaan mebel	Kabupaten Tuban	jumlah paket mebel yang disediakan	19 unit	95.487.000	
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kabupaten Tuban	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 unit	161.534.945	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kabupaten Tuban	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 unit	277.386.760	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan	Kabupaten Tuban	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan	1 unit	1.330.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan	Kabupaten Tuban	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan	1 unit	2.110.000.000	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

	Lainnya		Lainnya yang disediakan			Lainnya		Lainnya yang disediakan			
6.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Tuban	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang	7 jasa	480.775.810	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Tuban	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang	7 jasa	481.622.310	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Tuban	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	8.516.500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Tuban	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	4.022.500	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Tuban	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	187.497.600	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Tuban	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	192.500.100	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Kabupaten Tuban	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1 laporan	40.450.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Kabupaten Tuban	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1 laporan	40.450.000	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

	Kantor		Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Kantor		Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Tuban	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 laporan	244.311.710	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Tuban	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 laporan	244.649.710	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Tuban	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	78 unit	455.863.263	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Tuban	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	78 unit	455.863.263	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Kabupaten Tuban	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	1 unit	84.517.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Kabupaten Tuban	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	1 unit	84.517.500	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Tuban	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 unit	166.855.700	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Tuban	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 unit	166.855.700	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Tuban	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 unit	54.502.500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Tuban	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 unit	54.502.500	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Tuban	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilita si	5 unit	149.987.563	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Tuban	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitas i	5 unit	149.987.563	
2	Program pendaftaran penduduk	Kabupaten Tuban	Perekaman KTP Elektronik Persentase anak usia 0- 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	99,70% 60%	1.706.784.920	Program pendaftaran penduduk	Kabupaten Tuban	Kepemilikan KTP Elektronik Persentase anak usia 0- 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	99,66% 60%	1.500.427.964	
2.1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kabupaten Tuban	Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan	270.000 dokumen	1.468.196.606	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kabupaten Tuban	Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan	200.000 dokumen	1.312.046.007	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

	Pencatatan, Penatausahaa n dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Kabupaten Tuban	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausaha an dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	270.000 dokumen	1.396.051.831	Pencatatan, Penatausahaa n dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Kabupaten Tuban	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaa n dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	200.000 dokumen	1.266.187.502	
	Pencatatan, Penatausahaa n dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependuduka n	Kabupaten Tuban	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausaha an dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependuduk an	150.000 dokumen	72.144.775	Pencatatan, Penatausahaa n dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependuduka n	Kabupaten Tuban	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaa n dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependuduka n	150.000 dokumen	45.858.505	
2.2	Penyelenggara an Pendaftaran	Kabupaten Tuban	Jumlah kecamatan yang	20 kec	98.040.000	Penyelenggara an Pendaftaran	Kabupaten Tuban	Jumlah kecamatan yang	20 kec	59.078.150	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

	Penduduk		menyelengga rakan pendaftaran penduduk sesuai standar			Penduduk		menyelenggar akan pendaftaran penduduk sesuai standar			
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Kabupaten Tuban	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	1 dokumen	98.040.000	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Kabupaten Tuban	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	1 dokumen	59.078.150	
2.3	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara an Pendaftaran	Kabupaten Tuban	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara an	1 jenis	140.548.314	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara an Pendaftaran	Kabupaten Tuban	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara an	1 jenis	129.303.807	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

	Penduduk		Pendaftaran Penduduk yang dilaksanakan			Penduduk		Pendaftaran Penduduk yang dilaksanakan			
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Kabupaten Tuban	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataan Penduduk	1 laporan	140.548.314	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Kabupaten Tuban	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataan Penduduk	1 laporan	129.303.807	
3	Program pencatatan sipil	Kabupaten Tuban	Kepemilikan akta kelahiran	100%	205.757.966	Program pencatatan sipil	Kabupaten Tuban	Kepemilikan akta kelahiran	96%	151.003.498	
								Presentase Akta Kematian yang diterbitkan	100%		
3.1	Pelayanan Pencatatan Sipil	Kabupaten Tuban	Jumlah akta pencatatan sipil yang diterbitkan Penerbitan	26.249 24 akta perkawinan 9 akta	205.757.966	Pelayanan Pencatatan Sipil	Kabupaten Tuban	Jumlah akta pencatatan sipil yang diterbitkan Penerbitan	26.249 24 akta perkawinan 9 akta	151.003.498	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

			akta perkawinan Penerbitan akta perceraian Penerbitan Akta Kematian	cerai 2.448 akta kematian				akta perkawinan Penerbitan akta perceraian Penerbitan Akta Kematian	cerai 2.448 akta kematian		
	Pencatatan, Penatausahaa n dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kabupaten Tuban	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausaha an dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	26.249 dokumen	115.830.430	Pencatatan, Penatausahaa n dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kabupaten Tuban	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaa n dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	26.249 dokumen	109.776.430	
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kabupaten Tuban	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	2 layanan	89.927.536	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kabupaten Tuban	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	2 layanan	41.227.068	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

4	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Kabupaten Tuban	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (%)	19,05%	756.881.930	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Kabupaten Tuban	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (%)	21,43%	487.320.183	
			persentase pengelolaan jaringan SIAK dalam kondisi baik (%)	100,00%	-			persentase pengelolaan jaringan SIAK dalam kondisi baik (%)	100,00%	-	
4.1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kabupaten Tuban	Jumlah Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan yang dilaksanakan	8 OPD	94.983.150	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kabupaten Tuban	Jumlah Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan yang dilaksanakan	9 OPD	65.975.796	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

	Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Kabupaten Tuban	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	8 dokumen	94.983.150	Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Kabupaten Tuban	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	9 dokumen	65.975.796	
4.2	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kabupaten Tuban	Jumlah kecamatan yang terkoneksi jaringan SIAK	20 kec	501.898.880	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kabupaten Tuban	Jumlah kecamatan yang terkoneksi jaringan SIAK	20 kec	403.319.287	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggara an Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduka n	Kabupaten Tuban	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian , dan Pelaporan Penyelenggar aan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduk an yang Disusun	1 dokumen	501.898.880	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggara an Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduka n	Kabupaten Tuban	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggar aan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduka n yang Disusun	1 dokumen	403.319.287	
4.4	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi	Kabupaten Tuban	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi	1 kali	159.999.900	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi	Kabupaten Tuban	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi	1 kali	17.025.100	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

	Kependuduka n		Administrasi Kependuduk an			Kependuduka n		Administrasi Kependuduka n			
	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduka n dan Pendayaguna an Data Kependuduka n	Kabupaten Tuban	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduk an dan Pendayaguna an Data Kependuduk an	1 laporan	159.999.900	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduka n dan Pendayagunaa n Data Kependuduka n	Kabupaten Tuban	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduka n dan Pendayaguna an Data Kependuduka n	1 laporan	17.025.100	
5	Program Pengelolaan Profil Kependuduka n	Kabupaten Tuban	Persentase Penyajian Data Kependuduk an	100	76.231.580	Program Pengelolaan Profil Kependuduka n	Kabupaten Tuban	Persentase Penyajian Data Kependuduka n	100	56.427.480	
5.1	Penyusunan Profil Kependuduka	Kabupaten Tuban	Jumlah penyajian data	2 jenis	76.231.580	Penyusunan Profil Kependuduka	Kabupaten Tuban	Jumlah penyajian data	2 jenis	56.427.480	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

	n		kependuduk an			n		kependuduka n			
	Penyediaan Data Kependuduka n Kabupaten/K ota	Kabupaten Tuban	Jumlah Data Kependuduk an Kabupaten/K ota	60 dokumen	40.991.420	Penyediaan Data Kependuduka n Kabupaten/Ko ta	Kabupaten Tuban	Jumlah Data Kependuduka n Kabupaten/K ota	60 dokumen	31.334.595	
	Penyusunan Profil Data Perkembanga n dan Proyeksi Kependuduka n serta Kebutuhan yang lain	Kabupaten Tuban	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembanga n dan Proyeksi Kependuduk an serta Kebutuhan yang Lain	60 dokumen	35.240.160	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependuduka n serta Kebutuhan yang lain	Kabupaten Tuban	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembanga n dan Proyeksi Kependuduka n serta Kebutuhan yang Lain	60 dokumen	25.092.885	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Berdasarkan Musrenbang yang telah dilaksanakan dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten Tuban, tidak didapati usulan dari masyarakat yang mengarah pada Program dan Kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban. Dengan demikian hasil telaahan atas usulan program dan kegiatan masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Tahun 2025 adalah nihil.

Tabel. 2.4

Usulan Program dan Kegiatan
Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Pemerintah Kabupaten Tuban
Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tuban

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
		N I H I L			

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan P-RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2025, maka disusunlah Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Tahun 2025. Secara keseluruhan jumlah program pada P-RKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Tahun 2025 ada 5 (lima) program dan 16 (enam belas) kegiatan serta 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan dengan pagu indikatif masing-masing program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
(7 kegiatan dan 24 sub kegiatan) dengan anggaran sebesar:

Rp. 12.937.872.462,-
2. Program pendaftaran penduduk.
(3 kegiatan dan 6 sub kegiatan) dengan anggaran sebesar:

Rp. 1.500.427.964,-
3. Program pelayanan pencatatan sipil.
(1 kegiatan dan 2 sub kegiatan) dengan anggaran sebesar:

Rp. 151.003.498,-
4. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
(4 kegiatan dan 4 sub kegiatan) dengan anggaran sebesar:

Rp. 486.320.183,-
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan.
(1 kegiatan dan 2 sub kegiatan) dengan anggaran sebesar:

Rp. 56.427.480,-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

Tabel 3.4

Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025
dan Perkiraan Maju Tahun 2026

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				15.132.051.587				13.071.001.257
2	12	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Nilai AKIP Perangkat Daerah (poin)	Kabupaten Tuban	83,35	12.937.872.462	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		83,85	11.889.106.054
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan	Kabupaten Tuban	6 dokumen	101.344.900	Dana Transfer Umum-		6 dokumen	96.748.000

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Perangkat Daerah	Evaluasi yang tersusun				Dana Alokasi Umum			
2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Tuban	2 dokumen	62.045.800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2 dokumen	20.000.000
2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Kabupaten Tuban	4 laporan	16.936.100	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						SKPD							
2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Tuban	3 laporan	22.363.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7 laporan	76.748.000
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	Kabupaten Tuban	9 dokumen	7.865.360.392	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Perhitunga n Anggaran Tahun		9 dokumen	8.447.533.777

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
										Sebelumny a			
2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Tuban	72 orang/ Bulan	7.775.413.942	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		77 orang/ Bulan	8.377.795.177
2	12	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Tuban	12 dokumen	81.238.650	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		12 dokumen	64.738.600
2	12	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	Kabupaten Tuban	23 laporan	8.707.800	Dana Transfer Umum-		23 laporan	5.000.000

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				Dana Alokasi Umum			
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai	Kabupaten Tuban	1 orang	4.151.200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		-	-
2	12	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Terbelinnya paket seragam dinas	Kabupaten Tuban	1 Paket	976.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi		-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
										Umum			
2	12	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kabupaten Tuban	2 orang	3.175.200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		-	-
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	Kabupaten Tuban	5 Layanan	1.546.656.637	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4 Layanan	1.505.125.700
2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Tuban	1 Paket	8.018.582	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						yang Disediakan							
2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Tuban	1 Paket	1.161.275.667	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	1.181.000.000
2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Tuban	1 Paket	114.364.159	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	99.895.400
2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	Kabupaten Tuban	2 Paket	146.207.481	Dana Transfer Umum-		2 Paket	144.257.300

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Disediakan				Dana Alokasi Umum			
2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Kabupaten Tuban	1 Dokumen	16.267.620	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		-	-
2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Tuban	30 laporan	100.523.128	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		30 laporan	80.000.000
2	12	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Tuban	3 Jenis	2.482.873.760	Dana Transfer Umum-		1 Jenis	1.063.114.670

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pemerintahan Daerah					Dana Alokasi Umum			
2	12	01	2.07	0005	Pengadaan mebel	jumlah paket mebel yang disediakan	Kabupaten Tuban	83 unit	95.487.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		-	-
2	12	01	2.07	0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Tuban	16unit	277.986.760	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		-	-
2	12	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Tuban	1 unit	2.110.000.000	Dana Transfer Umum-		1 unit	1.063.114.670

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
										Dana Alokasi Umum			
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang	Kabupaten Tuban	7 jasa	481.622.310	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		6 jasa	447.056.660
2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Tuban	1 laporan	4.022.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		-	-
2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Kabupaten Tuban	12 laporan	192.500.100	Dana Transfer Umum- Dana		12 laporan	182.542.500

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						dan Listrik yang Disediakan				Alokasi Umum			
2	12	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Tuban	1 laporan	40.450.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		-	-
2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Tuban	12 laporan	244.649.710	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		12 laporan	264.514.160
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Tuban	4 unit	455.863.263	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi		3 unit	329.500.247

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
										Umum			
2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kabupaten Tuban	1 unit	84.517.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		-	-
2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Tuban	32 unit	166.855.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		33 unit	175.125.463
2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Kabupaten Tuban	47 unit	54.502.500	Dana Transfer Umum-		47 unit	74.375.700

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Dipelihara				Dana Alokasi Umum			
2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabetasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Kabupaten Tuban	5 unit	149.987.563	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 unit	79.999.084
2	12	02			Program pendaftaran penduduk	Perekaman KTP Elektronik Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Kabupaten Tuban	99,66% 60%	1.500.427.964	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		99,71% 65%	501.581.552
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan	Kabupaten Tuban	200.000 dokumen	1.312.046.007	Dana Transfer Umum-Dana		200.000 dokumen	352.046.002

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
										Alokasi Umum			
2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Kabupaten Tuban	200.000 dokumen	1.266.187.502	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		200.000 dokumen	306.187.502
2	12	02	2.01	0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kabupaten Tuban	150.000 dokumen	45.858.505	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		150.000 dokumen	45.858.500
2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran	Jumlah kecamatan yang	Kabupaten Tuban	20 kec	59.078.150	Dana Transfer		20 kec	34.535.550

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Penduduk	menyelenggarakan pendaftaran penduduk sesuai standar				Umum- Dana Alokasi Umum			
2	12	02	2.03	0007	Komunikasi Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan Edukasi	Kabupaten Tuban	1 Dokumen	59.078.150	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1	34.535.550
2	12	02	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk yang dilaksanakan	Kabupaten Tuban	1 jenis	129.303.807	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 jenis	115.000.000

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	12	02	2.04	0002	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	Kabupaten Tuban	1 laporan	129.303.807	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 laporan	115.000.000
2	12	03			Program pencatatan sipil	Kepemilikan akta kelahiran Kepemilikan akta kematian	Kabupaten Tuban	96,00% 100%	151.003.498	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		96,50% 100%	151.003.568
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah akta pencatatan sipil yang diterbitkan Penerbitan akta perkawinan	Kabupaten Tuban	26.249 24 akta perkawinan 9 akta	151.003.498	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		34. 257 27akta perkawinan 11 akta cerai 100 akta	151.003.568

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Penerbitan akta perceraian Penerbitan Akta Kematian		cerai 2.448 akta kematian		Umum		kematian	
2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kabupaten Tuban	26.249 dokumen	109.776.430	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		35.000 dokumen	109.775.500
2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Kabupaten Tuban	2 layanan	41.227.068	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2 layanan	41.227.068
2	12	04			Program pengelolaan informasi	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan	Kabupaten Tuban	16,67%	486.320.183	Dana Transfer		28.57%	464.320.083

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					administrasi kependudukan	data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (%)				Umum- Dana Alokasi Umum			
						persentase pengelolaan jaringan SIAK dalam kondisi baik (%)		100,00%	-	-		100,00%	-
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan yang dilaksanakan	Kabupaten Tuban	7 OPD	65.975.796	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		10OPD	43.975.796
2	12	04	2.01	0002	Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kabupaten Tuban	7 dokumen	65.975.796	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi		11 dokumen	43.975.796

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
										Umum			
2	12	04	2.02		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah kecamatan yang terkoneksi jaringan SIAK	Kabupaten Tuban	20 kec	403.319.287	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 kec	403.319.287
2	12	04	2.02	0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi	Kabupaten Tuban	1 dokumen	403.319.287	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	403.319.287

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Administrasi Kependudukan yang Disusun							
2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kabupaten Tuban	1 kali	17.025.100	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 kali	17.025.000
2	12	04	2.04	0003	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kabupaten Tuban	1 laporan	17.025.100	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 laporan	17.025.000

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	12	05			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Penyajian Data Kependudukan	Kabupaten Tuban	100	56.427.480	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100	65.000.000
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah penyajian data kependudukan	Kabupaten Tuban	2 jenis	56.427.480	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2 jenis	65.000.000
2	12	05	2.01	0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Kabupaten Tuban	60 dokumen	31.334.595	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		60 dokumen	35.000.000

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Kabupaten Tuban	30 dokumen	25.092.885	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		30 dokumen	30.000.000

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah merupakan dokumen awal yang disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati Tuban Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 96 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu kepada Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perubahan Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disusun dengan mengacu pada rancangan awal P-RKPD, Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan. Perubahan Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program/kegiatan/sub kegiatan ini merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban. Adapun program-programnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan/sub kegiatan yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja:

Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- a. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- b. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- c. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

Indikator Kinerja :

Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun.

- a. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN.
- b. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
- c. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

- a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Indikator Kinerja:

Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai.

- a. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- b. Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Indikator Kinerja:

Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum.

- a. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan.
- b. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

- c. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan.
 - d. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan.
 - e. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan.
 - f. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Pengadaan Mebel.
- a. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - b. Pengadaan Gedung Kantor atau Gedung Lainnya.

Indikator Kinerja:

Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah.

- a. Jumlah Paket Mebel yang disediakan.
 - b. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan.
 - c. Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Indikator Kinerja:

Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang.

- a. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - b. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan.
 - c. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan.
 - d. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Indikator Kinerja:

Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

- a. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya.
- b. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya.
- c. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara.
- d. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi.

B. Program Pendaftaran Penduduk.

Program ini diarahkan untuk melaksanakan pelayanan administrasi pendaftaran penduduk dengan kegiatan/sub kegiatan:

1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

- a. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk.
- b. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan.

Indikator Kinerja:

Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan.

- a. Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk.
- b. Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan.

2. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

- a. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat.

Indikator Kinerja:

Jumlah kecamatan yang menyelenggarakan pendaftaran penduduk sesuai standar.

- a. Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat.

3. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

- a. Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk.

Indikator Kinerja:

Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk yang dilaksanakan.

- a. Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk.

C. Program Pencatatan Sipil.

Program ini diarahkan untuk melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kegiatan/sub kegiatan:

1. Pelayanan Pencatatan Sipil

- a. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting.
- b. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil.

Indikator Kinerja :

- Jumlah akta pencatatan sipil yang diterbitkan.
- Penerbitan akta perkawinan.
- Penerbitan Akta Kematian.

- a. Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting.
- b. Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan.

D. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Program ini diarahkan untuk melaksanakan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan dengan kegiatan/sub kegiatan:

1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan.

- a. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan.

Indikator Kinerja :

Jumlah Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan yang dilaksanakan.

- a. Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan.

2. Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

- a. Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Indikator Kinerja :

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

Jumlah kecamatan yang terkoneksi jaringan SIAK.

- a. Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi.

3. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

- a. Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan.

Indikator Kinerja:

Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

- a. Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan.

E. Program Pengelolaan Profil Kependudukan.

Program ini diarahkan untuk melaksanakan pengelolaan profil kependudukan, yang dilakukan dengan kegiatan/sub kegiatan:

- 1. Penyusunan Profil Kependudukan.
 - a. Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota.
 - b. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain.

Indikator Kinerja :

Jumlah penyajian data kependudukan.

- a. Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota.
- b. Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

BAB IV
PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Tahun 2025 merupakan dokumen acuan bagi pelaksanaan pengembangan seluruh kegiatan satuan kerja. Dokumen Perubahan Rencana Kerja ini disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabel dan partisipatif dengan mengacu pada Peraturan Bupati Tuban Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 96 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Penetapan prioritas rencana pembangunan pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Tahun 2025 mengacu pada isu-isu strategis yang kemudian difokuskan pada program dan kegiatan bagi pencapaian tujuan dan sasaran sehingga semua kegiatan yang ada di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban akan lebih terarah dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pagu anggaran tiap-tiap usulan program/kegiatan yang disampaikan dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 dan merupakan pagu indikatif tiap-tiap program/kegiatan berdasarkan perkiraan/asumsi;
2. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban akan dijabarkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Tahun 2025;
3. Dokumen perubahan rencana kerja ini disusun dengan indikasi penggunaan anggaran sesuai dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 96 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan belum mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga dimungkinkan terjadinya perubahan anggaran sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ada.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

4. Dengan berpedoman pada dokumen perubahan rencana kerja ini diharapkan dapat menentukan langkah berupa kebijakan-kebijakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan sehingga semua kegiatan yang dilaksanakan akan berjalan secara lebih terarah dan teratur.

Sebagai tindak lanjut dari hasil penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P- Renja) Tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban akan melaksanakan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Penyempurnaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran. Melakukan penyesuaian dan penyelarasan terhadap dokumen Renja Perubahan agar sejalan dengan hasil evaluasi pelaksanaan program, perubahan arah kebijakan pembangunan daerah, serta kemampuan keuangan daerah Tahun Anggaran 2025.
2. Sinkronisasi dengan Dokumen Perencanaan Daerah. Menjamin keterpaduan antara Renja Perubahan dengan dokumen perencanaan daerah lainnya, seperti RKPD Perubahan Kabupaten Tuban Tahun 2025, Renstra Perangkat Daerah, serta dokumen RKA dan DPA Perubahan Tahun Anggaran 2025.
3. Penguatan Koordinasi dan Sinergi Pelaksanaan Program. Meningkatkan koordinasi internal antar bidang di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta memperkuat sinergi dengan perangkat daerah terkait, pemerintah desa/kelurahan, dan pemangku kepentingan lainnya guna mendukung efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang mengalami perubahan, guna memastikan kesesuaian antara target, realisasi, dan capaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan.
5. Peningkatan Kualitas Layanan dan Kapasitas Aparatur. Menindaklanjuti hasil perubahan Renja dengan upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta perbaikan tata kelola pelayanan administrasi kependudukan agar lebih cepat, tepat, dan akuntabel.
6. Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi Hasil. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan berdasarkan hasil pelaksanaan Renja Perubahan sebagai bahan evaluasi capaian kinerja dan dasar penyusunan rencana kerja tahun berikutnya.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

Demikian penyusunan perubahan dokumen perencanaan ini dipergunakan sebagai pedoman operasional untuk menjaga konsistensi, kesinambungan dan sinergi. Untuk mengantisipasi potensi perubahan dan perkembangan yang sangat cepat, tidak menutup kemungkinan adanya penyempurnaan dalam dokumen perencanaan ini.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TUBAN,

ttd.

ROHMAN UBAID

4.

3.

BUPATI TUBAN,

5.

2.

1.

ADITYA HALINDRA

6.

NO. PARAF KOORDINASI					
6. Sekretaris Daerah					
5. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Tuban					
4. Inspektur Inspektorat Daerah					
3. Kabag Hukum Setda					
2. Kepala Bapperida					
1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----